



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

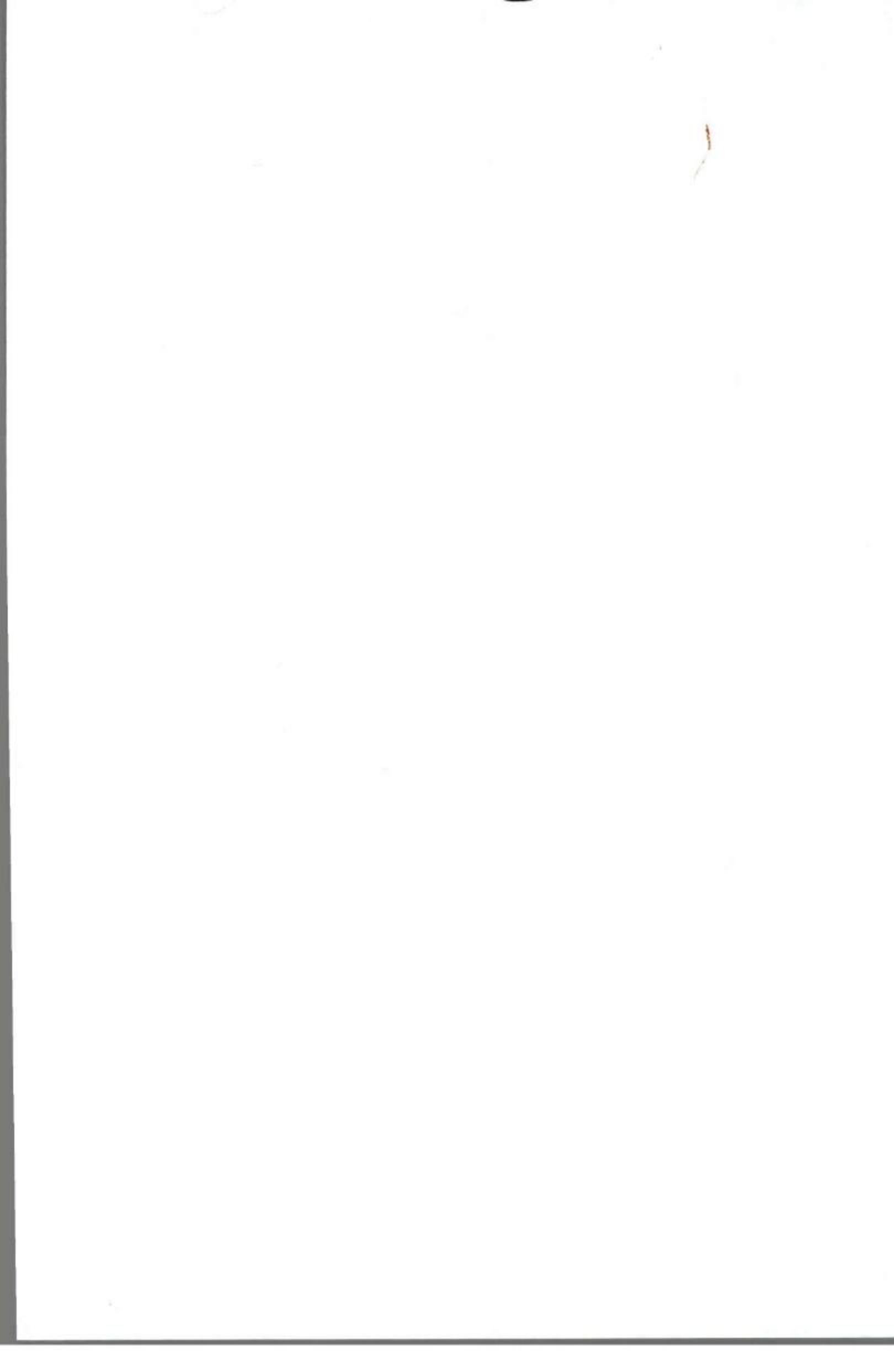
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;

- f. laporan perubahan ekuitas dan;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp 3.330.186.788.242,00	
b.	Belanja	Rp 3.249.141.935.364,00	
	Surplus		Rp 81.044.852.878,00
c.	Pembiayaan		
	- penerimaan	Rp 242.705.123.481,00	
	- pengeluaran	Rp 29.519.500.000,00	
	Pembiayaan netto		Rp213.185.623.481,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp10.091.088.609,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.340.277.876.851,00
 - 2. realisasi Rp 3.330.186.788.242,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp 10.091.088.609,00
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp307.691.064.968,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.556.833.000.332,00
 - 2. Realisasi Rp 3.249.141.935.364,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp 307.691.064.968,00

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah minus Rp297.599.976.359,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | anggaran surplus/(defisit)
setelah perubahan | (Rp 216.555.123.481,00) |
| 2. | realisasi | Rp 81.044.852.878,00 |
| | selisih lebih/(kurang) | (Rp 297.599.976.359,00) |

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | anggaran
pembiayaan setelah perubahan | Rp 247.705.123.481,00 |
| 2. | realisasi | Rp 242.705.123.481,00 |
| | selisih lebih/(kurang) | Rp 5.000.000.000,00 |

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.630.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | anggaran
pembiayaan setelah perubahan | Rp 31.150.000.000,00 |
| 2. | realisasi | Rp 29.519.500.000,00 |
| | selisih lebih/(kurang) | Rp 1.630.500.000,00 |

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.369.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan | Rp 216.555.123.481,00 |
| 2. | realisasi | Rp 213.185.623.481,00 |
| | selisih lebih/(kurang) | Rp 3.369.500.000,00 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|
| a. | saldo anggaran lebih awal | Rp 242.705.123.481,00 |
| b. | penggunaan saldo anggaran lebih | Rp 242.705.123.481,00 |
| c. | sisal lebih pembiayaan anggaran | Rp 294.230.476.359,00 |
| d. | saldo anggaran lebih akhir | Rp 294.230.476.359,00 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp6.540.515.839.032,71
b.	jumlah kewajiban	Rp 53.745.484.966,00
c.	jumlah ekuitas	Rp6.486.770.354.066,71

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp 3.056.694.845.188,35
b.	beban	Rp 2.755.161.430.514,25
c.	surplus/ (defisit) dari kegiatan nonoperasional	(Rp 7.108.521.017,82)
d.	pos luar biasa	(Rp 6.320.869.216,00)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp 243.030.332.423,00
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp 443.980.740.860,00
c.	arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 391.135.867.648,00)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 1.369.500.000,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp 5.278.918.101,00)
f.	kas di bendahara penerimaan	Rp 34.602.242,00
g.	kas di bendahara pengeluaran	Rp 5.387.152.032,00
h.	kas lainnya	Rp 331.584.441,00
i.	saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp 294.980.126.249,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp 6.178.629.906.924,43
b.	surplus/ (defisit)-LO	Rp 288.104.024.440,28
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp 20.036.422.702,00
e.	ekuitas akhir	Rp 6.486.770.354.066,71

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : daftar penyertaan modal (investasi daerah);
- Lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
- Lampiran I.9 : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.11 : daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : neraca;
- c. Lampiran III : laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : catatan atas laporan keuangan;
- e. Lampiran V : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. Lampiran VI : laporan operasional;
- g. Lampiran VII : laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

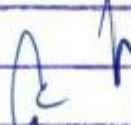
Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 13 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. bms	
2	Asmin	
3	Kabag. hukum	
4	KA. BKAD.	



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-155/2021)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

	Catatan	Anggaran 2020 (Perubahan) Rp	Realisasi 2020 (Audited) Rp	%	Realisasi 2019 (Audited) Rp
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.1.a	206.558.325.460,00	208.624.349.832,00	101,00	229.377.285.773,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.1.b	21.194.850.930,00	23.711.587.937,00	111,87	32.644.361.735,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.A.1.c	15.677.969.004,00	15.802.591.533,00	100,79	12.907.559.398,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.A.1.d	389.871.823.420,00	420.072.618.997,00	107,75	411.876.305.420,17
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		633.302.968.814,00	668.211.148.299,00	105,51	686.805.512.326,17
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.A.2.a	43.276.320.000,00	47.461.438.644,00	109,67	27.188.633.700,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.A.2.a	2.270.971.000,00	2.004.973.702,00	88,29	1.467.574.212,00
Dana Alokasi Umum	5.1.A.2.a	1.317.798.068.000,00	1.306.921.916.000,00	99,17	1.437.036.239.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.A.2.a	512.650.616.977,00	497.906.166.804,00	97,12	474.659.908.721,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.875.995.975.977,00	1.854.294.495.150,00	98,84	1.940.352.355.633,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya					
Dana Otonomi Khusus	5.1.A.2.b	39.577.682.000,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	5.1.A.2.b	0,00	39.577.682.000,00	~	44.828.869.000,00
Dana Desa	5.1.A.2.b	378.545.183.000,00	378.545.183.000,00	100,00	360.743.521.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		418.122.865.000,00	418.122.865.000,00	100,00	405.572.390.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.A.2.c	198.568.100.060,00	189.208.586.743,00	95,29	215.847.778.602,00
Pendapatan Bagi Hasil lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		198.568.100.060,00	189.208.586.743,00	95,29	215.847.778.602,00
Jumlah Pendapatan Transfer		2.492.686.941.037,00	2.461.625.946.893,00	98,75	2.561.772.524.235,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.1.A.3	189.673.967.000,00	182.105.101.820,00	96,01	167.439.942.427,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	~	0,00
Pendapatan Lainnya	5.1.A.3	24.614.000.000,00	18.244.591.230,00	74,12	18.908.016.315,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		214.287.967.000,00	200.349.693.050,00	93,50	186.347.958.742,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.340.277.876.851,00	3.330.186.788.242,00	99,70	3.434.925.995.303,17

	Catatan	Anggaran 2020 (Perubahan) Rp	Realisasi 2020 (Audited) Rp	%	Realisasi 2019 (Audited) Rp
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.B.1.a	1.404.019.859.116,00	1.259.274.504.404,00	89,69	1.317.180.709.881,00
Belanja Barang	5.1.B.1.b	1.041.274.853.860,00	939.245.834.242,00	90,20	949.470.698.650,40
Belanja Bunga		0,00	0,00	~	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	~	0,00
Belanja Hibah	5.1.B.1.c	39.788.150.000,00	37.456.450.000,00	94,14	40.857.344.650,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.B.1.d	11.561.782.400,00	6.021.727.200,00	52,08	13.859.458.800,00
Jumlah Belanja Operasi		2.496.644.645.376,00	2.241.998.515.846,00	89,80	2.321.368.211.981,40
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	5.1.B.2	12.431.490.800,00	11.713.397.328,00	94,22	8.168.354.576,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.B.2	122.723.232.702,00	109.957.064.819,00	89,60	93.368.565.888,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.B.2	87.365.111.902,00	76.760.898.881,00	87,86	112.662.636.972,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.B.2	171.449.371.868,00	164.271.492.147,00	95,81	263.219.979.395,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.B.2	791.767.350,00	767.556.409,00	96,94	1.377.960.440,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Belanja Modal		394.760.974.622,00	363.470.409.584,00	92,07	478.797.497.271,00
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.B.3	102.752.466.821,00	81.006.096.422,00	78,84	533.870.074,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		102.752.466.821,00	81.006.096.422,00	78,84	533.870.074,00
JUMLAH BELANJA		2.994.158.086.819,00	2.686.475.021.852,00	89,72	2.800.699.579.326,40
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Bagi Hasil Pajak	5.1.C.1	23.422.682.526,00	23.422.682.526,00	100,00	21.915.000.000,00
Bagi Hasil Retribusi	5.1.C.1	2.733.888.820,00	2.733.888.820,00	100,00	3.126.355.300,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan		26.156.571.346,00	26.156.571.346,00	100,00	25.041.355.300,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.C.2	533.605.927.167,00	533.597.927.166,00	100,00	630.524.389.419,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.C.2	2.912.415.000,00	2.912.415.000,00	100,00	1.284.877.452,00
Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		536.518.342.167,00	536.510.342.166,00	100,00	631.809.266.871,00
JUMLAH TRANSFER		562.674.913.513,00	562.666.913.512,00	100,00	656.850.622.171,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.556.833.000.332,00	3.249.141.935.364,00	91,35	3.457.550.201.497,40
SURPLUS/(DEFISIT)		(216.555.123.481,00)	81.044.852.878,00	-37,42	(22.624.206.194,23)

	Catatan	Anggaran 2020 (Perubahan) Rp	Realisasi 2020 (Audited) Rp	%	Realisasi 2019 (Audited) Rp
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA	5.1.D.1	242.705.123.481,00	242.705.123.481,00	100,00	290.345.329.675,23
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	~	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	~	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		247.705.123.481,00	242.705.123.481,00	97,98	290.345.329.675,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	~	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.D.2	28.150.000.000,00	28.150.000.000,00	100,00	23.435.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	~	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.D.2	0,00	0,00	~	0,00
Pengeluaran Investasi Non Permainen Lainnya	5.1.D.2	3.000.000.000,00	1.369.500.000,00	45,65	1.581.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		31.150.000.000,00	29.519.500.000,00	94,77	25.016.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO		216.555.123.481,00	213.185.623.481,00	98,44	265.329.329.675,23
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	294.230.476.359,00	~	242.705.123.481,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI BANYUMAS,

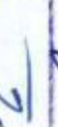


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asisten Adm. Umum	
3	Kabag hukum	
4	KA. BKAD	

lampiran 1.1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
		3	4	5	6
1	2				
5.4.03 . 4.03.03.002.1.05	Belanja Bantuan Sosial	11.561.782.400,00	5.971.827.200,00	(5.589.955.200,00)	(48,35)
5.4.03 . 4.03.03.002.1.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	26.156.571.346,00	26.156.571.346,00	0,00	0,00
5.4.03 . 4.03.03.002.1.07	Belanja Bantuan Keuangan	536.518.342.167,00	536.510.342.166,00	(8.000.001,00)	0,00
5.4.03 . 4.03.03.002.1.08	Belanja Tidak Terduga	102.752.466.821,00	81.006.096.422,00	(21.746.370.399,00)	(21,16)
5.4.04	Kepegawaian	22.795.992.266,00	11.892.480.207,00	(10.903.512.059,00)	(47,83)
5.4.04 . 4.04.01.002	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.795.992.266,00	11.892.480.207,00	(10.903.512.059,00)	(47,83)
5.4.04 . 4.04.01.002.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.918.848.819,00	6.974.892.396,00	(9.943.956.423,00)	(58,77)
5.4.04 . 4.04.01.002.1.01	Belanja Pegawai	16.918.848.819,00	6.974.892.396,00	(9.943.956.423,00)	(58,77)
5.4.04 . 4.04.01.002.2	BELANJA LANGSUNG	5.877.143.447,00	4.917.587.811,00	(959.555.636,00)	(16,33)
5.4.04 . 4.04.01.002.2.01	Belanja Pegawai	1.273.225.000,00	1.018.315.000,00	(254.910.000,00)	(20,02)
5.4.04 . 4.04.01.002.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.155.654.347,00	3.480.182.811,00	(675.471.536,00)	(16,25)
5.4.04 . 4.04.01.002.2.03	Belanja Modal	448.264.100,00	419.090.000,00	(29.174.100,00)	(6,51)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	216.555.123.481,00	213.185.623.481,00	(3.369.500.000,00)	(1,56)
6.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	216.555.123.481,00	213.185.623.481,00	(3.369.500.000,00)	(1,56)
6.4.03	Keuangan	216.555.123.481,00	213.185.623.481,00	(3.369.500.000,00)	(1,56)
6.4.03 . 4.03.03.002	Badan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD	278.855.123.481,00	272.224.623.481,00	(6.630.500.000,00)	(2,38)
6.4.03 . 4.03.03.002.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	247.705.123.481,00	242.705.123.481,00	(5.000.000.000,00)	(2,02)
6.4.03 . 4.03.03.002.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	242.705.123.481,00	242.705.123.481,00	0,00	0,00
6.4.03 . 4.03.03.002.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
6.4.03 . 4.03.03.002.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.150.000.000,00	29.519.500.000,00	(1.630.500.000,00)	(5,23)
6.4.03 . 4.03.03.002.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.150.000.000,00	28.150.000.000,00	0,00	0,00
6.4.03 . 4.03.03.002.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	1.369.500.000,00	(1.630.500.000,00)	(54,35)

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asmin.	
3	Kabang. hukum	
4	KA-BKAD	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Kepegawaian		Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
Unit Organisasi : 4.04.01 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kode Rekening		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.002 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia						
4.04 . 01.002.0.00.000.4	PENDAPATAN	2	3	4	5	6
4.04 . 01.002.0.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PERANGKAT DAERAH	91.650.000,00	92.432.574,00	782.574,00	0,85
4.04 . 01.002.0.00.000.4.1.02	Hasil Retribusi Daerah		91.650.000,00	92.432.574,00	782.574,00	0,85
4.04 . 01.002.0.00.000.4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		91.650.000,00	91.950.000,00	300.000,00	0,33
4.04 . 01.002.0.00.000.5	BELANJA		0,00	482.574,00	482.574,00	100,00
4.04 . 01.002.0.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		22.795.992.266,00	11.892.480.207,00	(10.903.512.059,00)	(47,83)
4.04 . 01.002.0.00.000.5.1.01	Belanja Pegawai		16.918.848.819,00	6.974.892.396,00	(9.943.956.423,00)	(58,77)
4.04 . 01.002.0.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG		16.918.848.819,00	6.974.892.396,00	(9.943.956.423,00)	(58,77)
4.04 . 01.002.4.04	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran		5.877.143.447,00	4.917.587.811,00	(959.555.636,00)	(16,33)
4.04 . 01.002.4.04.001	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah		2.141.916.487,00	1.898.066.582,00	(243.849.905,00)	(11,38)
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa		280.000.000,00	249.785.749,00	(30.214.251,00)	(10,79)
4.04 . 01.002.4.04.001	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	280.000.000,00	249.785.749,00	(30.214.251,00)	(10,79)	
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	414.411.787,00	356.648.899,00	(57.762.888,00)	(13,94)	
4.04 . 01.002.4.04.001	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	414.411.787,00	356.648.899,00	(57.762.888,00)	(13,94)	
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 01.002.4.04.001	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	107.969.863,00	(57.030.137,00)	(34,56)	
4.04 . 01.002.4.04.001	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	165.000.000,00	107.969.863,00	(57.030.137,00)	(34,56)	
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	472.504.700,00	443.210.000,00	(29.294.700,00)	(6,20)	
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.03	Belanja Modal	24.240.600,00	24.120.000,00	(120.600,00)	(0,50)	
4.04 . 01.002.4.04.001	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	448.264.100,00	419.090.000,00	(29.174.100,00)	(6,51)	
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	84.968.200,00	(15.031.800,00)	(15,03)	
4.04 . 01.002.4.04.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	100.000.000,00	84.968.200,00	(15.031.800,00)	(15,03)	
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.823.800,00	(176.200,00)	(0,09)	
4.04 . 01.002.4.04.001	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.823.800,00	(176.200,00)	(0,09)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
		3	4	5	6
4.04 . 01.002.4.04.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	120.000.000,00	109.675.071,00	(10.324.929,00)	(8,60)
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	109.675.071,00	(10.324.929,00)	(8,60)
4.04 . 01.002.4.04.001	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	162.000.000,00	117.985.000,00	(44.015.000,00)	(27,17)
4.04 . 01.002.4.04.001.5.2.01	Belanja Pegawai	162.000.000,00	117.985.000,00	(44.015.000,00)	(27,17)
4.04 . 01.002.4.04	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	143.660.000,00	134.151.595,00	(9.508.405,00)	(6,62)
4.04 . 01.002.4.04.018	Pembinaan dan penyelesaian masalah PNS	119.380.000,00	109.973.795,00	(9.406.205,00)	(7,88)
4.04 . 01.002.4.04.018.5.2.01	Belanja Pegawai	94.900.000,00	94.155.000,00	(745.000,00)	(0,79)
4.04 . 01.002.4.04.018.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	15.818.795,00	(8.661.205,00)	(35,38)
4.04 . 01.002.4.04.018	Penghargaan ASN	9.030.000,00	8.943.000,00	(87.000,00)	(0,96)
4.04 . 01.002.4.04.018.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	8.943.000,00	(87.000,00)	(0,96)
4.04 . 01.002.4.04.018	Penilaian Kinerja ASN	15.250.000,00	15.234.800,00	(15.200,00)	(0,10)
4.04 . 01.002.4.04.018.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	15.234.800,00	(15.200,00)	(0,10)
4.04 . 01.002.4.04	Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN	1.861.837.500,00	1.255.396.660,00	(606.440.840,00)	(32,57)
4.04 . 01.002.4.04.019	Pemrosesan pensiun dan penataan PNSD	109.361.500,00	53.496.500,00	(55.865.000,00)	(51,08)
4.04 . 01.002.4.04.019.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	109.361.500,00	53.496.500,00	(55.865.000,00)	(51,08)
4.04 . 01.002.4.04.019	Pengadaan Pegawai	1.725.137.000,00	1.176.167.160,00	(548.969.840,00)	(31,82)
4.04 . 01.002.4.04.019.5.2.01	Belanja Pegawai	308.375.000,00	112.075.000,00	(196.300.000,00)	(63,66)
4.04 . 01.002.4.04.019.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.416.762.000,00	1.064.092.160,00	(352.669.840,00)	(24,89)
4.04 . 01.002.4.04.019	Pengelolaan arsip CPNS dan PNS	12.090.000,00	11.594.500,00	(495.500,00)	(4,10)
4.04 . 01.002.4.04.019.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	12.090.000,00	11.594.500,00	(495.500,00)	(4,10)
4.04 . 01.002.4.04.019	Akurasi Data Pegawai	15.249.000,00	14.138.500,00	(1.110.500,00)	(7,28)
4.04 . 01.002.4.04.019.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	15.249.000,00	14.138.500,00	(1.110.500,00)	(7,28)
4.04 . 01.002.4.04	Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN	1.263.752.801,00	1.232.540.903,00	(31.211.898,00)	(2,47)
4.04 . 01.002.4.04.020	Pemetaan PNS Potensial Untuk menduduki JPTP dan jabatan administrasi	10.748.960,00	10.748.960,00	0,00	0,00
4.04 . 01.002.4.04.020.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	10.748.960,00	10.748.960,00	0,00	0,00
4.04 . 01.002.4.04.020	Pemrosesan jabatan tinggi pratama dan jabatan administrasi	1.116.017.789,00	1.086.856.413,00	(29.161.376,00)	(2,61)
4.04 . 01.002.4.04.020.5.2.01	Belanja Pegawai	699.850.000,00	686.300.000,00	(13.550.000,00)	(1,94)
4.04 . 01.002.4.04.020.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	416.167.789,00	400.556.413,00	(15.611.376,00)	(3,75)
4.04 . 01.002.4.04.020	Pemrosesan kenaikan pangkat	92.489.661,00	91.716.086,00	(773.575,00)	(0,84)
4.04 . 01.002.4.04.020.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	92.489.661,00	91.716.086,00	(773.575,00)	(0,84)
4.04 . 01.002.4.04.020	Pemrosesan Jabatan Fungsional	44.496.391,00	43.219.444,00	(1.276.947,00)	(2,87)
4.04 . 01.002.4.04.020.5.2.01	Belanja Pegawai	8.100.000,00	7.800.000,00	(300.000,00)	(3,70)
4.04 . 01.002.4.04.020.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	36.396.391,00	35.419.444,00	(976.947,00)	(2,68)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
		3	4	5	6
4.04 . 01.002.4.05	Program Pengembangan Kompetensi ASN Penyelenggaraan Diklat Aparatur Sipil Negara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembangan dan Peningkatan Mutu Diklat Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Sumber Daya Aparatur Belanja Barang dan Jasa SURPLUS/DEFISIT	465.976.659,00	397.432.071,00	(68.544.588,00)	(14,71)
4.04 . 01.002.4.05.015		13.000.000,00	12.726.280,00	(273.720,00)	(2,11)
4.04 . 01.002.4.05.015.5.2.01		0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 01.002.4.05.015.5.2.02		13.000.000,00	12.726.280,00	(273.720,00)	(2,11)
4.04 . 01.002.4.05.015		23.100.000,00	13.085.320,00	(10.014.680,00)	(43,35)
4.04 . 01.002.4.05.015.5.2.02		23.100.000,00	13.085.320,00	(10.014.680,00)	(43,35)
4.04 . 01.002.4.05.015		429.876.659,00	371.620.471,00	(58.256.188,00)	(13,55)
4.04 . 01.002.4.05.015.5.2.02		429.876.659,00	371.620.471,00	(58.256.188,00)	(13,55)
		(22.704.342.266,00)	(11.800.047.633,00)	10.904.294.633,00	(48,03)

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asmin.	
3	Kabag. hukum	
4	KA. BKAD	

lampiran 1.3

Kode	Uraian	Anggaran Realisasi					Bertambah (Berkurang)	Persen
		Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)		
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal				
9	1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
			1.273.225.000,00	4.155.654.347,00	448.264.100,00	5.877.143.447,00		
			1.018.315.000,00	3.480.182.811,00	419.090.000,00	4.917.587.811,00	959.555.636,00	
	Total							83,67

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asmim.	
3	Kaleng. hukum	
4	KA. BKAD	

lampiran 1.4

Kode		Uraian		Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6		
04 3 06	Perdagangan	12.687.268.557,00	6.953.664.808,00	(5.733.603.749,00)	(45,19)		
04 3 07	Perindustrian	27.820.673.910,00	25.392.924.557,00	(2.427.749.353,00)	(8,73)		
04 3 08	Transmigrasi	20.000.000,00	19.121.075,00	(878.925,00)	(4,39)		
05 1 04	Lingkungan Hidup	90.313.071.433,00	83.695.646.324,00	(6.617.425.109,00)	(7,33)		
05 2 04	Penataan Ruang	45.729.198.983,00	42.658.401.285,00	(3.070.797.698,00)	(6,72)		
05 2 05	Pertanahan	180.286.600,00	163.895.100,00	(16.391.500,00)	(9,09)		
06 1 03	Lingkungan Hidup	44.403.585.850,00	40.873.349.939,00	(3.530.235.911,00)	(7,95)		
06 1 05	Perumahan dan Fasilitas Umum	231.149.697.658,00	217.227.553.875,00	(13.922.143.783,00)	(6,02)		
07 1 02	Pekerjaan Umum	211.254.082.751,00	199.538.083.169,00	(11.715.999.582,00)	(5,55)		
07 2 08	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.895.614.907,00	17.689.470.706,00	(2.206.144.201,00)	(11,09)		
08 2 16	Kesehatan	742.998.297.316,00	665.007.894.077,00	(77.990.403.239,00)	(10,50)		
08 3 02	Kesehatan	734.543.626.316,00	660.966.209.664,00	(73.577.416.652,00)	(10,02)		
10 1 01	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.454.671.000,00	4.041.684.413,00	(4.412.986.587,00)	(52,20)		
10 2 13	Pariwisata dan Budaya	7.558.041.256,00	5.620.560.846,00	(1.937.480.410,00)	(25,63)		
10 2 17	Kebudayaan	2.168.939.889,00	1.936.871.168,00	(232.068.721,00)	(10,70)		
11 1 07	Pariwisata	5.389.101.367,00	3.683.689.678,00	(1.705.411.689,00)	(31,65)		
11 2 02	Pendidikan	1.200.301.632.107,00	1.094.731.400.013,00	(105.570.232.094,00)	(8,80)		
11 2 06	Pendidikan	1.183.149.268.698,00	1.079.308.559.394,00	(103.840.709.304,00)	(8,78)		
11 2 06	Kepemudaan dan Olahraga	16.825.478.449,00	15.110.486.774,00	(1.714.991.675,00)	(10,19)		
11 2 06	Perpustakaan	326.884.960,00	312.353.845,00	(14.531.115,00)	(4,45)		
11 2 06	Perpustakaan	27.756.464.176,00	24.616.697.379,00	(3.139.766.797,00)	(11,31)		
11 2 06	Perpustakaan	6.024.310.492,00	5.543.911.103,00	(480.399.389,00)	(7,97)		
11 2 06	Sosial	567.762.177,00	480.167.223,00	(87.594.954,00)	(15,43)		
11 2 06	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.164.391.507,00	18.592.619.053,00	(2.571.772.454,00)	(12,15)		
11 2 06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						

10

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asmin	
3	Kabag hukum	
4	KA. BKAD	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.5
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam Rupiah

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1.	Piutang Pajak	2020	100.641.514.928,00
	Pajak Hotel dan Restoran	2020	8.672.720,00
	Pajak Reklame	2020	399.724.055,00
	Pajak Air Tanah	2020	425.194.291,00
	PBB-P2	2020	99.264.802.465,00
	BPHTB	2020	543.121.397,00
2.	Piutang Retribusi	2020	1.965.495.036,00
	Retribusi Pelayanan Parkir	2020	885.874.303,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2020	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2020	235.366.138,00
	Retribusi Terminal	2020	157.478.500,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2020	138.300.000,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2020	239.821.950,00
	Retribusi Ijin Gangguan	2020	6.394.750,00
	Retribusi Lainnya	2020	302.259.395,00
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2020	378.058.239,15
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2020	378.058.239,15
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2020	37.081.321.215,00
	Tuntutan ganti rugi atas kekayaan daerah	2020	761.050.000,00
	Denda Retribusi	2020	36.698.864,00
	BLUD	2020	36.283.572.351,00
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	2020	-
Jumlah			140.066.389.418,15

BUPATI BANYUMAS,

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asnin	
3	Kabag hukum	
4	KA. BKAD	


 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.6
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Modal			Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal yang Telah Diartikan Sampai Dengan Tahun Anggaran yang Lalu (2019)		Penyertaan Modal Tahun Ini (2020)		Jumlah Modal yang Telah Diartikan sampai dengan Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Diartikan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini (Bagian Laba Tahun 2020)	Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Diartikan sampai dengan Tahun Ini (2020)
		Modal Dasar	Dasar Hukum	Porsi Kepemilikan Modal Disetor		Nilai Nominal	Dasar Hukum Penyertaan Modal Terakhir	Nilai Nominal	Dasar Hukum Penyertaan Modal Tahun 2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+9	12=5-11	12	13	14=11-13
1.	PT. Bank BPD Jateng (Persero)	5.000.000.000.000,00	AD/ART Bank Jateng	-	Uang Tunai	36.919.000.000,00	-	5.550.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2020	42.469.000.000,00	-	7.579.855.319,00	-	42.469.000.000,00
2.	PT. BPR BKS Jateng (Persero)	924.840.000.000,00	Perda Prov. Jateng No. 14 Tahun 2019	31.268.840.000,00	Uang Tunai	12.250.000.000,00	-	-	-	12.250.000.000,00	19.018.840.000,00	-	-	12.250.000.000,00
3.	PT. BPR BKS Purwokerto (Persero)	175.000.000.000,00	Perda Prov. Jateng No. 14 Tahun 2019	85.750.000.000,00	Uang Tunai	24.500.000.000,00	-	-	-	24.500.000.000,00	61.250.000.000,00	8.218.958.937,00	-	24.500.000.000,00
4.	Perumda Pasar Satia	337.692.558.438,00	Perda Kab. Banyumas No. 5 Tahun 2019	3.070.920.000,00	Uang Tunai	3.070.920.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 11 Tahun 2018	-	-	3.070.920.000,00	-	-	-	3.070.920.000,00
5.	Perumda Tirta Satra	500.000.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 9 Tahun 2019	500.000.000.000,00	Uang Tunai	143.759.686.555,96	Perda Kab. Banyumas No. 4 Tahun 2018	22.600.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 8 Tahun 2020	166.359.686.555,96	333.640.313.444,04	-	-	166.359.686.555,96
6.	PT. PRPP Jateng	50.000.000.000,00	Perda Provinsi Dati I Jateng No. 9 Tahun 1993	443.749.000,00	Uang Tunai	443.200.000,00	Perda Provinsi Dati I Jateng No. 9 Tahun 1993	-	-	443.200.000,00	549.000,00	3.777.307,00	-	443.200.000,00
7.	PT. BLJ (Persero)	10.000.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 2 Tahun 2019	9.990.000.000,00	Uang Tunai	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	7.990.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00
						222.942.806.555,96				251.092.806.555,96	442.040.702.444,04	15.802.891.533,00	-	251.092.806.555,96

BUPATI BANYUMAS,

 ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asmin	
3	Kabag hukum	
4	KA- BKAD	

LAMPIRAN I.7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2020

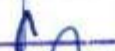
Dalam Rupiah

No.	URAIAN	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi	Saldo 31 Desember 2020
1	2	3	4	5
1.	Tanah	3.111.132.568.046,00	55.730.301.286,00	3.166.862.869.332,00
2.	Peralatan dan Mesin	999.660.908.976,13	101.621.279.549,68	1.101.282.188.525,81
3.	Gedung dan Bangunan	1.615.403.164.161,56	129.572.214.947,58	1.744.975.379.109,14
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.336.298.143.598,00	199.142.348.519,00	2.535.440.492.117,00
5.	Aset Tetap Lainnya	102.399.853.759,86	3.998.908.801,00	106.398.762.560,86
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	46.779.359.223,00	(7.730.859.009,00)	39.048.500.214,00
Jumlah		8.211.673.997.764,55	482.334.194.094,26	8.694.008.191.858,81

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asmin	
3	Kabag hukum	
4	KA BKAD	

LAMPIRAN I.8
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2020

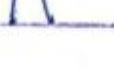
Dalam Rupiah

No.	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1		3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Bendahara	-	-	-	-
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Bukan Bendahara	-	-	-	-
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	117.951.191.567,00	-	35.183.646.850,00	82.767.544.717,00
	Pasar Terminal Ajibarang	211.046.850,00	-	211.046.850,00	-
	Pasar Terminal Wangon	904.718.615,00	-	-	904.718.615,00
	Kolam Renang Langen Tirta Kembar	34.972.600.000,00	-	34.972.600.000,00	-
	Bangunan kompleks Kebondalem	72.985.149.000,00	-	-	72.985.149.000,00
	Tanah untuk bangunan HGB Pasar Wage	8.877.677.102,00	-	-	8.877.677.102,00
3.	Aset Tidak Berwujud	2.775.683.449,00	-	190.162.305,00	2.585.521.144,00
	Software	2.775.683.449,00	-	190.162.305,00	2.585.521.144,00
4.	Aset Lain-lain	132.331.217.370,82	118.877.064,00	28.839.015.908,00	103.611.078.526,82
	Barang rusak berat	132.331.217.370,82	-	28.839.015.908,00	103.492.201.462,82
	Kas yang dibatasi penggunaannya	-	118.877.064,00	-	118.877.064,00
	Jumlah	253.058.092.386,82	118.877.064,00	64.212.825.063,00	188.964.144.387,82

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. BMS	
2	Asmin	
3	Kabag hukum	
4	KA. BKAD	

LAMPIRAN I.9
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kode Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Jumlah realisasi tahun 2018, 2019, dan 2020			Jumlah akumulasi realisasi s.d. akhir tahun 2020	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya
			Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH			-	-	-	-	-

Dalam Rupiah

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab.Bms	
2	Asmin	
3	Kabag hukum	
4	KA-BKAD	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.10
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR DANA CADANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Dalam Rupiah	
								Sisa Dana yang Belum Dicapai	Sisa Dana yang Belum Dicapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah									

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. BMS	
2	Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	KA-BKAD	

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.11
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini			Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)		Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	NIHIL
JUMLAH												

Dalam Rupiah

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab Bms	
2	Asmin..	
3	Kabag hukum	
4	KA BKAD	

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NERACA
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

	Catatan	31 Desember 2020 (Audited) Rp	31 Desember 2019 (Audited) Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	5.3.A.1	222.140.883.834,00	203.378.045.136,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.A.2	34.602.242,00	66.419.848,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.A.3	5.387.152.032,00	151.925.856,00
Kas di BLUD	5.3.A.4	59.359.664.230,00	34.228.662.958,00
Kas Lainnya	5.3.A.5	8.044.923.911,00	5.667.834.908,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.A.6	-	-
Piutang			
Piutang Pendapatan	5.3.A.7	180.894.369.780,35	183.419.387.107,50
Piutang Lain-lain		-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	5.3.A.8	(81.620.222.059,64)	(78.637.250.873,25)
Jumlah Piutang (Bersih)		99.274.147.720,71	104.782.136.234,25
Beban Dibayar di Muka	5.3.A.9	56.021.004,17	33.450.000,00
Persediaan	5.3.A.10	57.282.251.550,70	45.194.874.103,59
Jumlah Aset Lancar		451.579.646.524,58	393.503.349.043,84
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen	5.3.B.1		
Dana Bergulir		10.220.282.762,00	8.825.605.435,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	5.3.B.2	(4.005.708.081,65)	(3.339.340.927,45)
Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih)		6.214.574.680,35	5.486.264.507,55
Investasi Permanen	5.3.B.3	372.233.537.959,32	334.229.733.585,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang		378.448.112.639,67	339.715.998.092,87
ASET TETAP			
Tanah	5.3.C.1	3.166.862.869.332,00	3.111.132.568.046,00
Peralatan dan Mesin	5.3.C.1	1.101.282.188.525,81	999.660.908.976,13
Gedung dan Bangunan	5.3.C.1	1.744.975.379.109,14	1.615.403.164.161,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.3.C.1	2.535.440.492.117,00	2.336.298.143.598,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.C.1	106.398.762.560,86	102.399.853.759,86
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.C.1	39.048.500.214,00	46.779.359.223,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.C.2	(3.098.321.702.481,85)	(2.887.785.245.543,40)
Jumlah Aset Tetap		5.595.686.489.376,96	5.323.888.752.221,15
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA			
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.D.1	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.D.2	61.877.241.715,00	97.060.888.565,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.D.3	146.262.772,00	322.499.375,00
Aset Lain-lain	5.3.D.4	103.611.078.526,82	132.331.217.370,82
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.D.5	(50.832.992.522,32)	(60.170.289.156,00)
Jumlah Aset Lainnya		114.801.590.491,50	169.544.316.154,82
JUMLAH ASET		6.540.515.839.032,71	6.226.652.415.512,68

	Catatan	31 Desember 2020 (Audited) Rp	31 Desember 2019 (Audited) Rp
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.E.1.a	524.042.513,00	543.554.646,00
Utang Bunga		-	-
Utang Pajak		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.E.1.b	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.E.1.c	453.131.465,00	1.160.892.742,25
Utang Beban	5.3.E.1.d	37.883.296.200,00	34.804.861.200,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.E.1.e	3.385.014.788,00	13.200.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		53.745.484.966,00	48.022.508.588,25
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	5.3.E.2	-	-
Utang Luar Negeri		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		53.745.484.966,00	48.022.508.588,25
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.F	6.486.770.354.066,71	6.178.629.906.924,43
JUMLAH EKUITAS		6.486.770.354.066,71	6.178.629.906.924,43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		6.540.515.839.032,71	6.226.652.415.512,68

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab.Bms	
2	Asmin	
3	Kabag hukum	
4	KA. BKAD	

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

	Catatan	Tahun 2020 (Audited) Rp	Tahun 2019 (Audited) Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.A.1	208.624.349.832,00	229.377.285.773,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.A.1	23.767.585.335,00	32.859.905.780,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.A.1	15.802.591.533,00	12.907.559.398,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.A.1	419.482.099.997,00	410.567.494.748,17
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1	47.461.438.644,00	27.188.633.700,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.A.1	2.004.973.702,00	1.467.574.212,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.A.1	1.306.921.916.000,00	1.437.036.239.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.A.1	497.906.166.804,00	474.659.908.721,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.A.1	39.577.682.000,00	44.828.869.000,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.A.1	378.545.183.000,00	360.743.521.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1	189.208.586.743,00	215.847.778.602,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.A.1	-	-
Penerimaan Hibah	5.5.A.1	182.105.101.820,00	167.439.942.427,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya	5.5.A.1	18.244.591.230,00	18.908.016.315,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		3.329.652.266.640,00	3.433.832.728.676,17
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pegawai	5.5.A.2	1.259.274.504.404,00	1.317.180.709.881,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.A.2	939.245.834.242,00	949.470.698.650,40
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah	5.5.A.2	37.456.450.000,00	40.857.344.650,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.A.2	6.021.727.200,00	13.859.458.800,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.A.2	536.510.342.166,00	631.809.266.871,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.A.2	81.006.096.422,00	533.870.074,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.A.2	23.422.682.526,00	21.915.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.A.2	2.733.888.820,00	3.126.355.300,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.885.671.525.780,00	2.978.752.704.226,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		443.980.740.860,00	455.080.024.449,77
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.B.1	110.108.000,00	1.115.636.672,00
Penerimaan penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.B.1	469.420.500,00	179.613.000,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.1	10.990.500,00	13.561.000,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		590.519.000,00	1.308.810.672,00

	Catatan	Tahun 2020 (Audited) Rp	Tahun 2019 (Audited) Rp
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah	5.5.B.2	11.713.397.328,00	8.168.354.576,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.B.2	109.957.064.819,00	93.368.565.888,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.B.2	76.760.898.881,00	112.662.636.972,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.B.2	164.271.492.147,00	263.219.979.395,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.2	767.556.409,00	1.377.960.440,00
Perolehan Aset Lainnya		105.977.064,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.B.2	28.150.000.000,00	23.435.000.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		391.726.386.648,00	502.232.497.271,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(391.135.867.648,00)	(500.923.686.599,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.C	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.5.C	-	-
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		-	-
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pokok Utang	5.5.C	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.C	1.369.500.000,00	1.581.000.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		1.369.500.000,00	1.581.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.369.500.000,00)	(1.581.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.1	104.430.873.715,00	86.997.351.359,00
Arus Kas Masuk Transitoris Lainnya	5.5.D.1	29.173.101.265,00	23.310.597.876,00
Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu	5.5.D.1	122.599.215,00	77.828.314,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		133.726.574.195,00	110.385.777.549,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.2	104.435.123.771,00	86.949.047.832,00
Arus Kas Keluar Transitoris Lainnya	5.5.D.2	29.184.205.379,00	23.302.837.915,00
Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan	5.5.D.2	5.386.163.146,00	122.599.215,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		139.005.492.296,00	110.374.484.962,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(5.278.918.101,00)	11.292.587,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		46.196.455.111,00	(47.413.369.562,23)
Saldo Awal Kas Daerah, BLUD dan Dana BOS		243.030.332.423,00	290.443.701.985,23
Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, dan Dana BOS		289.226.787.534,00	243.030.332.423,00
Kas di Bendahara Penerimaan		34.602.242,00	66.419.848,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		5.387.152.032,00	151.925.856,00
Kas Lainnya		331.584.441,00	244.210.579,00
Saldo Akhir Kas		294.980.126.249,00	243.492.888.706,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asmin	
3	Kabang. hukum	
4	KA. BKAD	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas) TA 2020 pada hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara umum merupakan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan SAP tersebut, laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual, yang pada Pemkab Banyumas diterapkan mulai TA 2014.

Pemkab Banyumas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

LKPD Kabupaten Banyumas TA 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2020 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

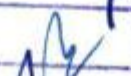
Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2020. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Purwokerto,

2021

BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda kab. Bms	
2	Asmin	
3	Kabag hukum	
4	KA. BKAD	

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

	Catatan	2020 (Audited) Rp	2019 (Audited) Rp
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL		242.705.123.481,00	290.345.329.675,23
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.A	242.705.123.481,00	290.345.329.675,23
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.B	294.230.476.359,00	242.705.123.481,00
Sub Total		294.230.476.359,00	242.705.123.481,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.C	294.230.476.359,00	242.705.123.481,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asmin	
3	Kabag. hukum	
4	KA. BKAD	

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

	Catatan	2020 (Audited) Rp	2019 (Audited) Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.A.1.a	214.951.250.761,00	232.767.121.105,00	(17.815.870.344,00)	(7,65)
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.A.1.b	23.503.619.513,00	33.518.616.198,75	(10.014.996.685,75)	(29,88)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5 A.1.c	25.652.625.406,00	18.531.476.407,15	7.121.148.998,85	38,43
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.4.A.1.d	417.353.161.282,35	423.496.165.484,17	(6.143.004.201,82)	(1,45)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		681.460.656.962,35	708.313.379.195,07	(26.852.722.232,72)	(3,79)
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.A.2.a	47.102.351.564,00	47.040.923.562,00	61.428.002,00	0,13
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.4.A.2.a	2.064.156.653,00	2.066.107.794,00	(1.951.141,00)	(0,09)
Dana Alokasi Umum	5.4.A.2.a	1.306.921.916.000,00	1.441.765.282.000,00	(134.843.366.000,00)	(9,35)
Dana Alokasi Khusus	5.4.A.2.a	497.906.166.804,00	474.659.908.721,00	23.246.258.083,00	4,90
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.853.994.591.021,00	1.965.532.222.077,00	(111.537.631.056,00)	(5,67)
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya					
Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
Dana Penyesuaian	5.4.A.2.b	39.577.682.000,00	44.828.869.000,00	(5.251.187.000,00)	(11,71)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		39.577.682.000,00	44.828.869.000,00	(5.251.187.000,00)	(11,71)
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.A.2	207.900.285.786,00	210.472.276.602,00	(2.571.990.816,00)	(1,22)
Pendapatan Bagi Hasil lainnya	5.4.A.2	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi		207.900.285.786,00	210.472.276.602,00	(2.571.990.816,00)	(1,22)
Jumlah Pendapatan Transfer		2.101.472.558.807,00	2.220.833.367.679,00	(119.360.808.872,00)	(5,37)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.4.A.3	255.517.038.189,00	207.012.438.750,00	48.504.599.439,00	23,43
Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.4.A.3	18.244.591.230,00	18.908.016.315,00	(663.425.085,00)	(3,51)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		273.761.629.419,00	225.920.455.065,00	47.841.174.354,00	21,18
JUMLAH PENDAPATAN		3.056.694.845.188,35	3.155.067.201.939,07	(98.372.356.750,72)	(3,12)

	Catatan	2020 (Audited) Rp	2019 (Audited) Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
BEBAN					
Beban Pegawai	5.4.B.1	1.261.948.375.184,00	1.316.807.018.576,00	(54.858.643.392,00)	(4,17)
Beban Persediaan	5.4.B.2	198.365.562.729,86	175.764.409.317,88	22.601.153.411,98	12,86
Beban Jasa	5.4.B.2	674.273.864.524,28	654.292.915.086,40	19.980.949.437,88	3,05
Beban Pemeliharaan	5.4.B.2	21.736.356.982,00	36.162.908.846,00	(14.426.551.864,00)	(39,89)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.B.2	50.371.981.473,00	75.081.053.814,00	(24.709.072.341,00)	(32,91)
Beban Bunga		-	-	-	~
Beban Subsidi		-	-	-	~
Beban Hibah	5.4.B.3	90.886.093.739,00	64.425.791.606,00	26.460.302.133,00	41,07
Beban Bantuan Sosial	5.4.B.4	11.620.085.323,00	13.914.127.800,00	(2.294.042.477,00)	(16,49)
Beban Penyusutan	5.4.B.5	257.123.097.351,77	467.516.047.676,95	(210.392.950.325,18)	(45,00)
Beban Penyisihan	5.4.B.6	4.047.915.541,14	2.676.763.045,18	1.371.152.495,96	51,22
Beban Transfer	5.4.B.7	184.121.730.512,00	296.107.101.171,00	(111.985.370.659,00)	(37,82)
Beban Lain-lain	5.4.B.8	666.367.154,20	325.319.971,95	341.047.182,25	104,83
JUMLAH BEBAN		2.755.161.430.514,25	3.103.073.456.911,36	(347.912.026.397,11)	(11,21)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI		301.533.414.674,10	51.993.745.027,71	249.539.669.646,39	479,94
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	~
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	~
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	~
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	~
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.C	(7.108.521.017,82)	(6.000.559.192,00)	(1.107.961.825,82)	18,46
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(7.108.521.017,82)	(6.000.559.192,00)	(1.107.961.825,82)	18,46
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		294.424.893.656,28	45.993.185.835,71	248.431.707.820,57	540,15
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	~
Beban Luar Biasa	5.4.C.D	6.320.869.216,00	533.870.074,00	5.786.999.142,00	1.083,97
Jumlah Pos Luar Biasa		(6.320.869.216,00)	(533.870.074,00)	(5.786.999.142,00)	1.083,97
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		288.104.024.440,28	45.459.315.761,71	242.644.708.678,57	533,76

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab.Bmr	
2	Asmin	
3	Kabag. hukum	
4	KA. BKAD	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

	Catatan	2020 (Audited) Rp	2019 (Audited) Rp
EKUITAS AWAL	5.6.A	6.178.629.906.924,43	6.372.280.602.025,72
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.B	288.104.024.440,28	45.459.315.761,71
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Lain-lain	5.6.C	20.036.422.702,00	(239.110.010.863,00)
EKUITAS AKHIR		6.486.770.354.066,71	6.178.629.906.924,43

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda kab. Bms	
2	Asmin	
3	Kabag. hukum	
4	KA. BKAD	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KINERJA

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam skala nilai dan peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

A. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Hasil pengukuran atas indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

TUJUAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
TUJUAN 1						
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	68,76*	101,12	Sangat tinggi
TUJUAN 2						
Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat						
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,55	71,98	99,21	Sangat tinggi
TUJUAN 3						
Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan						
3.	Persentase penduduk miskin	%	11,53	13,26	85,00	Tinggi
4.	Indeks Gini	Indeks	0,307	0,3132*	97,98	Sangat tinggi
5.	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,3376	0,5*	51,90	Rendah
6.	PDRB per kapita	Juta Rp.	33.000	31,87*	96,56	Sangat tinggi

TUJUAN 4						
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian						
7.	Persentase pertumbuhan PDRB	%	6,45	-1,65	-25,58	Sangat rendah
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	101,33	104,05	102,68	Sangat tinggi
TUJUAN 5						
Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis						
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,01	79,27	107,11	Sangat tinggi
TUJUAN 6						
Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja						
10.	Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2	41,53	2.076,50	Sangat tinggi
11.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	63,88	70,04	109,64	Sangat tinggi
TUJUAN 7						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat						
12.	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	80,01	67,38	84,21	Tinggi
TUJUAN 8						
Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif						
13.	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata (wisaman dan wisnus)	%	5,86	-61,85	-1.055,46	Sangat rendah
14.	Persentase pertumbuhan industri kreatif	%	5	5,65	113,00	Sangat tinggi
15.	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,23	6	58,16	Rendah
TUJUAN 9						
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat						
16.	Persentase penurunan konflik sosial	%	5	7,14	142,80	Sangat tinggi
17.	Angka kriminalitas	kasus	792	727	108,21	Sangat tinggi
18.	Indeks Demokrasi	Indeks	79,3	77,22	97,38	Sangat tinggi
19.	Persentase pelestarian budaya Banyumas	%	47,47	46,30	97,54	Sangat tinggi
RATA-RATA CAPAIAN					134,10	Sangat tinggi

Dilihat dari tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah sebesar 134,10 persen dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Berdasarkan data capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut di atas, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Predikat Kinerja Tahun 2020

No.	Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	IKU	%
1	Sangat tinggi	13	68,41
2	tinggi	2	10,53
3	Sedang	-	-
4	Rendah	2	10,53
5	Sangat rendah	2	10,53
	JUMLAH IKU	19	100,00

B. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebagaimana grafik berikut ini:



Sumber: Bagian Organisasi (diolah), 2020

Adapun pencapaian kinerja pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas nomor 70 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 dan Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 telah dilakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh tim dari Kemenpan dan RB, namun sampai dengan selesai disusunnya laporan kinerja ini belum ada hasil evaluasi yang diperoleh. Sehingga capaian indeks reformasi yang disajikan pada laporan ini merupakan hasil evaluasi tahun 2019. Secara lebih rinci realisasi capaian indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	68	68,76*	101,12

Capaian kinerja tujuan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 adalah sebesar 68,76. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			Tahun 2018	Tahun 2019
I	Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	2,77	2,02
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,40	1,96
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,01	3,04
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,85	3,03
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,39	11,99
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,12	4,24
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	5,73	5,57
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,92	3,37
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	36,19	35,22
II	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,43	9,93
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,74	5,23
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,92	6,53
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Suvei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,40	8,85
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,49	33,54
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	66,68	68,76

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	66,68	68,76	68,76*	75	91,68

Terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2018 sebesar 66,68 di tahun 2018 naik di tahun 2019 menjadi sebesar 68,76 dengan kategori “B”. Walaupun terdapat peningkatan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas, masih perlu dilakukan perbaikan yang setara pada tingkat Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Mengoptimalkan fungsi tim reformasi internal melalui pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya sampai ke OPD;
2. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menjawab isu-isu strategis terkait masalah reformasi birokrasi di tingkat OPD;
3. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukannya secara berkala

untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Pemkab Banyumas;

4. Meningkatkan pengetahuan terhadap assesor PMPRB Pemkab Banyumas tentang kondisi ideal yang diharapkan pada masing-masing area perubahan;
5. Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan agen perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan;
6. Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan *mindset* terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Banyumas;
7. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan-undangan secara berkala;
8. Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada pencapaian kinerja yang dihasilkan.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SOP;
10. Meningkatkan implementasi pengelolaan arsip di tingkat Pemda dan OPD;
11. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain melakukan *assesment* pegawai secara menyeluruh, dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi dan dapat dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*;
12. Meningkatkan implementasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, penerapan SPIP dan *Whistle Blowing System*;
13. Meningkatkan penerapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Pemkab Banyumas sehingga dapat semakin mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi;
14. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik di tingkat OPD dalam hal pemberian *reward/punishment* kepada pemberi layanan, menginformasikan hasil survey eksternal kepada *stakeholder* serta menindaklanjuti hasil survey eksternal terutama terhadap komponen survey yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas SDM terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,55	71,98	99,21

Data BPS Jawa Tengah, 2020

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,49	71,96	71,98	74,35	96,81

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia untuk tahun 2020 yaitu 71,98, dari target sebesar 72,55 atau mencapai 99,21 persen. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2020 ini mencapai 96,81 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengutip isi *Human Development Report (HDR)* pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf.

Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik dan pad metode baru diubah menjadi angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Komponen IPM adalah sebagai berikut:

- a. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir (*Expectation of life/Eo*), merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi baru lahir pada tahun tersebut.
- b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) *Expected Years of Schooling* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.
- c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal.
- d. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan oleh nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

Adapun capaian IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

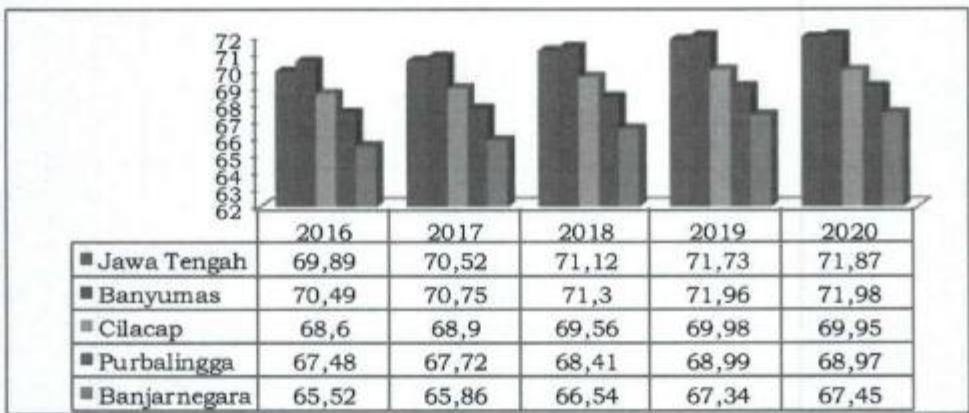
Tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas
Tahun 2015-2020

Komponen IPM	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Angka harapan hidup	73,12	73,23	73,33	73,45	73,52	73,72
Harapan Lama Sekolah	12,57	12,58	12,63	12,64	12,82	12,85
Rata-rata Lama Sekolah	7,31	7,39	7,40	7,41	7,42	7,52
Disparitas Daya Beli	10.104	10.554	10.713	11.240	11,703	11.448
IPM	69,89	70,49	70,75	71,30	71,96	71,98

Sumber: BPS Kab. Banyumas, 2020

Pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan didalam perolehan IPM. IPM Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu yang tertinggi di BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dan selalu lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah.

Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga Tahun 2016 s.d 2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Program

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.	7.601.829.590	5.898.423.871	77,59
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan.	326.884.960	289.676.150	88.62
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.	729.182.802	423.491.552	58,08
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat.	69.134.221.406	58.897.658.667	85,2
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat	154.495.473.909	154.071.053.119	99,73
6	Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan.	2.241.250.000	2.084.185.002	93
7	Program Peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan	37.668.863.000	37.489.114.500	99,52
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.	17.302.669.910	15.655.282.624	90,48
9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata. Dinas Kesehatan	4.000.000.000	3.994.942.525	99,87

10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata. RSU Banyumas	20.180.193.000	18.291.327.020	90,64
11	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata. RSU Ajibarang	14.600.778.000	13639043.208	93,41
12	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.	148.906.800	85.424.800	57,37
13	Program Pelayanan Kesehatan.	35.604.762.500	21.065.074.131	59,16
14	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD. RSU Ajibarang	81.614.350.765	76.939.505.423	94,27
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	4.968.237.350	4.968.237.350	100,00
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	6.766.695.040	5.980.872.039	88,38
17	Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan.	234.000.000	213.788.744	91,36
18	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	15.589.941.400	12.845.235.995	82,39
19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	51.280.983.977	41.413.564.702	80,76
20	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat.	201.880.500	187.608.738	92,93
21	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD.RSU Banyumas	195.435.309.073	192.738.210.298	98,62
22	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.	4.149.240.000	3.213.325.488	77,44
23	Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat.	188.000.000	179.179.800	95,31

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM antara lain:

1. Belum meratanya sarana prasarana sekolah dan masih rendahnya APS dimana Angka HLS dan rata-rata lama sekolah masih rendah dimana indikator tersebut menjadi komponen indikator IPM;
2. Kurangnya pemahaman kesehatan masyarakat dengan banyaknya angka kematian ibu melahirkan dan gizi buruk.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Meningkatkan angka Partisipasi Masyarakat yang akan berdampak dengan naiknya Angka HLS dan RLS sehingga pembangunan manusia akan semakin meningkat. Menekan Anak Tidak Sekolah dengan fasilitasi sarana dan prasarana untuk anak tidak sekolah karena Kebutuhan Khusus, anak yang putus sekolah karena ekonomi dan anak yang tidak melanjutkan karena tidak ada biaya melanjutkan.

2. Penyebaran kualitas dan kuantitas pendidik perlu ditingkatkan dengan menambah pendidik yang sesuai dengan kompetensinya dan yang mempunyai kualitas yang ditentukan.
3. Mengadakan pelatihan khusus pendidik terhadap pembelajaran bagi guru yang belum memenuhi kualitas yang ditentukan seperti guru, harus bisa IT karena tuntutan perkembangan jaman.
4. Meningkatkan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Promosi Kesehatan dan program perbaikan gizi masyarakat sebagai upaya untuk mencapai pembangunan manusia dalam komponen Usia Harapan Hidup.

Tujuan 3: Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pembangunan yang beradilan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) indikator utama, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Penduduk Miskin	%	11,53	13,26	85,00
Indeks Gini	Indeks	0,307	*0,3132	97,98
Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,3376	*0,5	51,90
PDRB Per Kapita	Juta Rp.	33	31.870	96,56

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Penduduk Miskin	%	17,05	12,53	13,26	8,56	45,09
Indeks Gini	Indeks	0,31	*0,3132	*0,3132	0,304	96,97
Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,01	*0,5638	*0,5	0,3256	46,44
PDRB Per Kapita	Juta Rp.	29.230	31,870	*31.870	38.655	82,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Capaian indikator Indeks Gini dan Indeks Ketimpangan Williamson, menggunakan capaian tahun lalu, karena sudah tidak dirilis oleh BPS. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin

Selama periode tahun 2015 – 2020, penduduk miskin di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Adapun jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 2015 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas dari Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	286,00	17,52
2016	283,90	17,23
2017	283,20	17,05
2018	226,2	13,5
2019	211,6	12,53
2020	225,90	13,26

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Grafik Persentase Penduduk Miskin



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Naiknya angka kemiskinan tahun 2020 dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a. Dampak pandemi COVID-19 yang menimpa di seluruh negara. Dengan pandemi COVID-19 ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di hampir semua sektor lapangan pekerjaan sehingga menciptakan pengangguran yang berdampak pada turunnya penghasilan/ pendapatan. Selain itu juga berdampak pada UMKM yang mengalami penurunan omzet secara drastis karena daya beli masyarakat menurun. Dampak adanya pandemi COVID-19 terhadap para pekerja di Kabupaten Banyumas yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 324 orang, pekerja yang dirumahkan sebanyak 2.388 orang (sumber data Dinakerkop UKM tahun 2020).

- b. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 juga memberi dampak multisektoral yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan masyarakat terlebih aspek perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016–2019 telah mengalami penurunan, meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 Persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas meningkat sebesar 0,74 persen dari 12,53 persen pada tahun 2019 menjadi 13,26 persen pada tahun 2020.

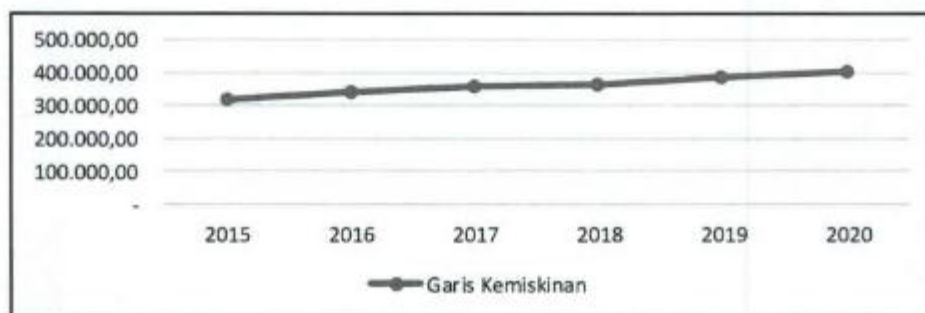
Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 garis kemiskinan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp320.585,00 kemudian meningkat sampai di tahun 2019 menjadi Rp385.140,00 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp406.250,00. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Tabel Garis Kemiskinan Tahun 2015 sampai dengan 2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	320.585	344.514	357.748	366.442	385.140	406.250

Sumber : BPS Jawa Tengah tahun 2020

Grafik Garis Kemiskinan Tahun 2015 sampai dengan 2020 (Rp/kapita/bulan)



Sumber : BPS Jawa Tengah tahun 2020

Indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banyumas selama periode 2015 hingga 2020 cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 2,91 persen dan terus mengalami penurunan hingga di tahun 2020 sebesar 2,25 persen.

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tidak berbeda jauh dengan Indeks kedalaman kemiskinan, maka indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, kecuali untuk tahun 2017 indeks keparahan kemiskinan tidak berubah dari tahun sebelumnya. Penurunan di tahun 2018 sebesar 0,15 poin, kemudian di tahun 2019 penurunan sebesar 0,67 dan untuk tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,17 poin sehingga indeks keparahan kemiskinan di Tahun 2020 sebesar 0,50 persen. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya kemiskinan tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya
Tahun 2015 s.d 2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,91	3,08	3,19	2,6	2,52	2,25
Indeks Keparahannya Kemiskinan	0,71	0,85	0,85	0,7	0,67	0,50

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

Angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas selalu mengalami penurunan. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten tetangga adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga Tahun 2015 sampai tahun 2020



Sumber : BPS Jawa Tengah tahun 2020

Meskipun beberapa indikator kemiskinan menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun masih perlu upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih diprioritaskan di daerah perdesaan untuk dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam dan terlalu parah”. Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari

kepala rumah tangga dan kondisi perumahan. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

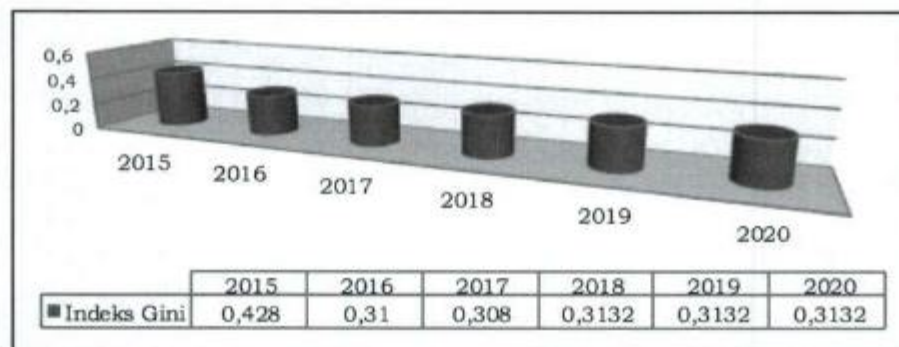
2. Capaian Kinerja Indikator Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai indeks gini mendekati nilai 0 (nol), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai indeks gininya mendekati 1 (satu).

Perkembangan Indeks Gini di Banyumas dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2019 menunjukkan angka yang cenderung membaik. Realisasi Indeks Gini Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah sebesar 0,31 dari target sebesar 0,307 atau mencapai target 97,98 persen. Realisasi ini masih menggunakan realisasi tahun 2019, karena mulai tahun 2019, BPS tidak merilis indeks gini. Indeks Gini Tahun 2015 sampai dengan 2020 cenderung fluktuasi, dimana tahun 2016 mengalami penurunan angka absolut dari tahun sebelumnya (Tahun 2015). Meskipun masih tergolong ke dalam ketimpangan distribusi sedang, namun hal tersebut mencerminkan distribusi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 lebih merata dibanding tahun 2017. Hal tersebut diindikasikan terjadi karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil ke Kabupaten Banyumas.

Nilai Indeks Gini di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik Indeks Gini Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020



Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BPS, data tahun 2020 belum rilis

Data di atas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan perkapita per keluarga di Kabupaten Banyumas dalam keadaan cukup merata (ketimpangan sedang). Namun yang harus diperhatikan adalah secara runut waktu, dari tahun ke tahun Indeks Gini Kabupaten Banyumas masih fluaktif, namun secara umum menunjukkan tren menurun.

Dengan pendami COVID-19 tahun 2020 yang sangat berpengaruh terhadap segala aspek, dimungkinkan terjadi penurunan indeks karena adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2019

yaitu 12,53 naik menjadi 0,72 persen sehingga pada tahun 2020 menjadi 13,26 persen. Penurunan kemiskinan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau semakin berkurangnya masyarakat miskin, sehingga kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya juga semakin menipis kadang menunjukkan gejala naik.

Ada tiga kemungkinan penyebab meningkatnya Indeks Gini:

- a. Meningkatnya jumlah penduduk. Penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2020 berjumlah 1.873.196 orang, naik 33.044 orang dari tahun 2019 sejumlah 1.840.152 orang sehingga peningkatan jumlah penduduk ini berpotensi menurunkan pendapatan perkapita.
- b. Laju inflasi, dimana inflasi Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah 1,90 sementara inflasi tahun 2019 adalah 2,28 sehingga dengan turunnya inflasi menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat yang mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan pada masyarakat.
- c. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Banyumas.

Dalam rangka menurunkan Indeks Gini, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan upaya antara lain:

- a. Optimalisasi pemasaran penanaman modal, dengan mempermudah berinvestasi di Kabupaten Banyumas berupa Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berdiri pada tahun 2019, yang melayani 134 perizinan di Kabupaten Banyumas.
- b. Perbaikan infrastruktur bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas baik sarana perhubungan, kesehatan maupun pendidikan.

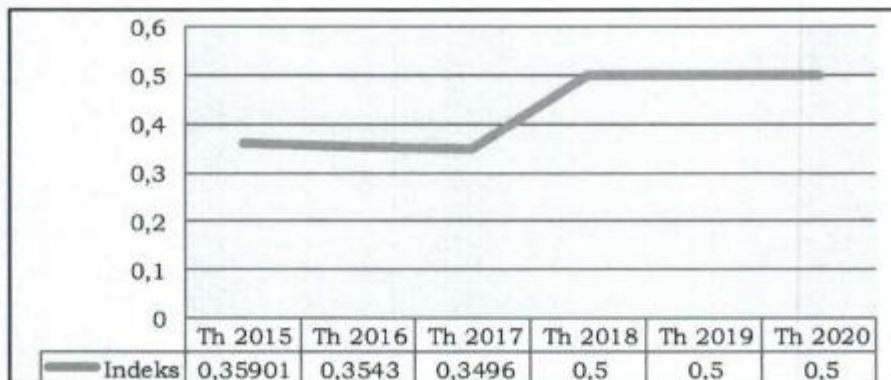
3. Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat daerah maju dan daerah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Banyumas menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson memberikan gambaran tentang kondisi dan keberhasilan pembangunan ditinjau dari aspek penyebaran hasil pembangunan. Angka indeks Williamson yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin kecil. Hasil perhitungan indeks Williamson Kabupaten Banyumas tahun 2014 mencapai 0,3546 dan tahun 2015 meningkat sampai dengan 0,35901 dan tahun 2016 menurun mencapai 0,3543 dan menurun kembali di tahun 2017 sebesar 0,3496, dan di tahun 2018 naik menjadi 0,5. Hasil perhitungan Indeks Williamson

sampai dengan tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019 yaitu sebesar 0,5 karena mulai tahun 2019 BPS tidak merilis indeks Ketimpangan Williamson. Realisasi indeks ketimpangan antar wilayah dari tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik Indeks Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten Banyumas
Tahun 2015-2020



Sumber: Bappedalitbang dan BPS Kab. Banyumas

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah antara lain:

1. Migrasi penduduk produktif yang memiliki *skill*/terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar dan kesempatan merubah masa depan yang lebih baik.
2. Investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang karena faktor market, lokasi, dan kesempatan kerja, dimana keuntungan relatif lebih besar, demikian pula resiko kerugian relative lebih kecil pada umumnya.
3. Kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sosial dan ekonomi capital di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar dan sebagai pusat pemerintahan.

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut. Ketimpangan yang dimaksud disini adalah merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu wilayah. Upaya-upaya tersebut meliputi:

- 1) Penyebaran pembangunan prasarana perhubungan.
- 2) Pengembangan pusat pertumbuhan
- 3) Pengembangan sektor pertanian yang memiliki peranan paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
- 4) Pengembangan agribisnis dengan basis padat karya
- 5) Peningkatan anggaran pembangunan untuk pembiayaan perbaikan dan pengembangan infrastruktur maupun kualitas pendidikan dan kesehatan.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Pembangunan Kabupaten Banyumas beberapa tahun belakangan terbilang sangat pesat. Sampai dengan selesainya disusun laporan ini, data tahun 2020 belum rilis, sehingga menggunakan data tahun 2019. Kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 2019 sebesar 6,32 persen. Nilai tambah yang tercipta tahun 2019 menurut PDRB menurut lapangan usaha di wilayah Banyumas sebesar 53,94 trilyun rupiah, sementara menurut harga konstan 2010 angka PDRB sebesar 39,77 triliun rupiah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah adalah nilai **PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.** Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk selama satu tahun.

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita tercatat sebesar 23,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 31,87 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banyumas yang sudah tidak terpengaruh oleh inflasi dapat dilihat pada Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Sejak tahun 2015 hingga 2019 juga senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita atas dasar harga konstan tercatat sebesar 19,05 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 23,50 juta rupiah.

Tabel Angka PDRB per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Perkapita Adhb (Juta)	PDRB Perkapita Adhk (Juta)
2015	23,72	19,05
2016	25,46	20,03
2017	27,38	21,11
2018	29,72	22,28
2019	31,87	23,50

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Capaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di eks Karesidenan Banyumas tahun 2017 sampai 2019 dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku (juta Rp/tahun)
Tahun 2017-2019

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Cilacap	60,94	64,51	66,12
Banyumas	27,38	29,72	31,87
Purbalingga	23,39	25,07	26,68
Banjarnegara	20,34	21,87	23,39
Jawa Tengah	34,22	36,78	39,24

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Pembangunan secara menyeluruh dapat dikatakan berhasil apabila dinilai dengan suatu indikator dan memiliki keterbandingan dengan wilayah lainnya. Penilaian dapat didasarkan pada indikator sosial, indikator ekonomi dan indikator sosial ekonomi. Indikator sosial diantaranya adalah data kependudukan, data ketenagakerjaan dan data kemiskinan. Jawa Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk ketiga terbesar di Indonesia, dan 4,87 persen diantaranya mendiami wilayah Kabupaten Banyumas. Angka rasio ketergantungan Banyumas tahun 2019 (49,16) masuk dalam kategori rendah karena dibawah 50 persen, tetapi masih di atas rasio ketergantungan Provinsi Jawa Tengah (47,75). Semakin rendah angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Capaian kinerja tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Program

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial.	767.308.162	738.089.088	96,19
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.	603.311.024	463.945.334	76,09
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	688.193.150	631.685.000	91,79
4	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.	700.000	700.000	100,00
5	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	2.138.420.966	2.058.130.966	96,25
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.	100.000.000	98.851.500	98,85
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.	973.481.534	380.426.005	39,08
8	Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	301.375.151	300.772.651	99,08
9	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender .	78.916.089	78.906.089	99,99
10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	440.797.088	353.212.134	80,13
11	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan	48.049.000	48.049.000	100,00

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	Pemenuhan Hak Anak.			
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.	162.326.400	152.433.240	93,91
13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.	492.887.600	464.703.890	94,28
14	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.	79.934.000	74.934.550	93,75
15	Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa.	4.880.500	4.880.500	100,00
16	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	71.342.000	71.342.000	100,00
17	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB.	7.627.505.000	3.381.806.913	44,34
18	Program Pelayanan Keluarga Berencana.	827.166.000	659.877.500	79,78

Tujuan 4: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan NonPertanian

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Rata-rata capaian kinerja tujuan ini adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,45	-1,65	-25,58
Nilai Tukar Petani	Indeks	101,33	104.05*	102,68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,45	6,32	-1,65	6,65	-24,81
Nilai Tukar Petani	Indeks	100,33	104.05	104.05*	102,86	101,16

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2020

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan dapat dilihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi dan berbagai inovasi di bidang sosial.

Dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 memberi dampak multisektoral yang berpengaruh terhadap seluruh sektor perekonomian masyarakat, sehingga prediksi angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas hanya mencapai minus 1,5 persen.

PDRB Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2020 sebesar 53.682 trilyun rupiah, sementara menurut harga konstan 2010 angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat sebesar 39,121 trilyun rupiah (BPS Banyumas, 2020).

Adapun rincian persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyumas, tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Banyumas

	SEKTOR PDRB	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,15	12,73	11,99	12,45
B	Pertambangan dan Penggalian	5,56	5,72	5,53	5,57
C	Industri Pengolahan	24,32	24,34	24,66	25,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,08
F	Konstruksi	12,82	13,25	13,20	12,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,19	15,28	15,57	15,23
H	Transportasi dan Pergudangan	3,56	3,49	3,56	2,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,38	3,30	3,33	3,11
J	Informasi dan Komunikasi	4,67	4,66	4,89	5,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,31	3,22	3,15	3,23
L	Real Estate	2,23	2,20	2,18	2,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,32	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	3,06	2,98	3,00
P	Jasa Pendidikan	5,40	5,51	5,64	5,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	1,00	1,00	1,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,78	1,75	1,82	1,75

Sumber: Data BPS Banyumas, 2020

Adapun rincian laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir dari masing-masing Kabupaten di wilayah Barlingmascakeb adalah sebagai berikut:

Tabel Laju Pertumbuhan PDRB) atas Dasar Harga Konstan 2020 menurut Lapangan Usaha di Wilayah Barlingmascakeb Tahun 2015 – 2020

Kabupaten	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Cilacap	5,96	5,09	2,58	2,99	2,27	-10,36
Banyumas	6,12	6,05	6,34	6,45	6,32	-1,65
Purbalingga	5,47	4,85	5,37	5,42	5,65	-1,23
Banjarnegara	5,47	5,44	5,65	5,67	5,60	-1,32
Kebumen	6,18	5,01	5,15	5,53	5,52	-1,46

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020

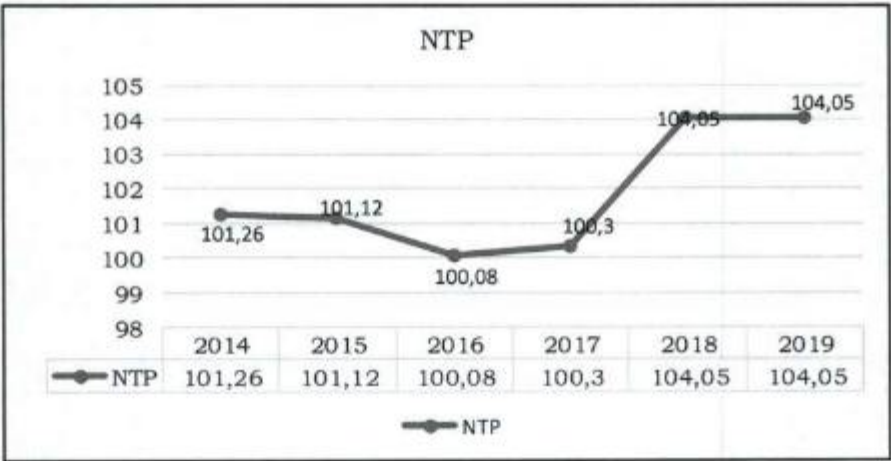
Sektor industri dan perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan PDRB di kabupaten Banyumas. Pada tahun 2020 sektor ini mengalami penurunan yang drastis. Ditunjukkan pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB sebesar 6,32 persen dan pada tahun 2020 pertumbuhannya minus 1,65 persen. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan negatif di tingkat nasional dan propinsi Jawa Tengah.

2. Nilai Tukar Petani

Untuk melihat keberhasilan pembangunan khususnya di sektor pertanian, selain data tentang pertumbuhan ekonomi juga diperlukan data pengukur daya tukar petani mengingat petani merupakan pelaku utama di sektor pertanian. Daya tukar petani dapat diketahui melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konseptual, NTP menunjukkan adanya daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi.

Capaian NTP pada Kabupaten Banyumas untuk tahun 2020 belum rilis, sehingga dalam laporan ini tercantum nilai tukar petani tahun 2019 yaitu sebesar 104,05. Hal ini berarti petani masih mengalami surplus, atau harga produksinya masih lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi (pendapatan petani masih lebih besar dari pengeluarannya). Adapun capaian NTP dari tahun 2014– 2019 adalah sebagai berikut:

Grafik Nilai Tukar Petani Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2019



Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait dengan NTP adalah rendahnya NTP. Faktor-faktor penyebab rendahnya Nilai Tukar Petani antara lain:

1. Masih terbatasnya pengembangan hasil olahan agroindustri sektor pertanian.
2. Masih terbatasnya pembinaan/pendampingan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif .
3. Masih terbatasnya penyediaan sarana produksi dan teknologi budidaya ikan.

Dalam mengatasi hal ini, maka yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mengembangkan komoditas hasil agroindustri berupa hasil olahan sektor pertanian agar memiliki nilai tambah ekonomis, membuka lapangan kerja, memperluas pasar bagi produk pertanian.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas.
3. Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, dan penerapan teknologi budidaya pertanian, komoditas unggulan pertanian.
4. Meningkatkan penyediaan sarana produksi budidaya, optimalisasi pembenihan ikan, serta meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) komoditas unggulan perikanan.
5. Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian dan hasil peternakan agar memiliki nilai tambah ekonomi.

Gambar Bupati Banyumas dalam acara pelatihan kewirausahaan bidang ketahanan pangan Kabupaten Banyumas



6. Meningkatkan keselamatan petani penderes dengan *safety belt*.

Tujuan 5: Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Sektor

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis maka ditetapkan satu indikator yaitu indeks ketahanan pangan. Adapun capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,01	79,27	107,11

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja		Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	Indeks	73,99	73,99	79,27	74,04	107,06

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019

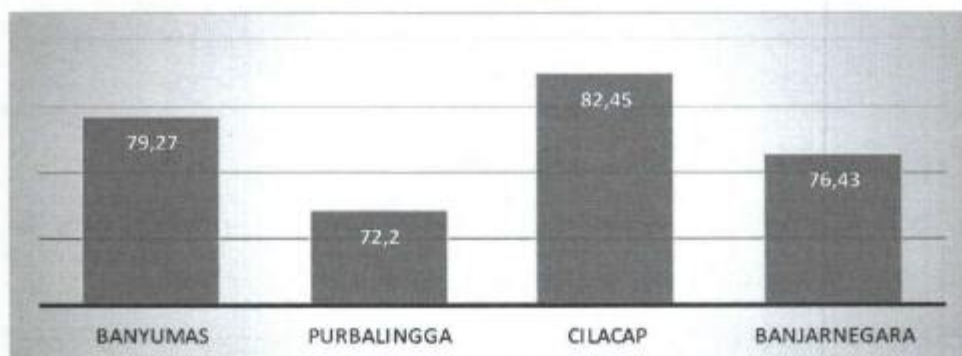
Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat Kabupaten/Kota.

Capaian indikator indeks ketahanan pangan Kabupaten Banyumas masih menggunakan capaian tahun 2019, karena sampai dengan selesainya penyusunan LKjIP ini, capaian tahun 2020 belum dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Adapun capaian indeks ketahanan pangan tahun 2019 untuk Kabupaten Banyumas adalah sebesar 79,27.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten di sekitar Kabupaten Banyumas, nilai IKP Kabupaten Banyumas adalah nomor 2 setelah Kabupaten Cilacap. Adapun grafik IKP adalah sebagai berikut:

Grafik Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga Tahun 2019



Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019

Masalah yang berkaitan dengan pangan di masa mendatang memiliki multidimensi baik yang bersifat lintas bidang, lintas komoditas, lintas daerah dan lintas penduduk. Berdasar kenyataan tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, maka strategi pemantapan ketahanan pangan di masa depan perlu mengantisipasi berbagai kondisi tersebut. Pendekatan pembangunan ketahanan pangan dimasa depan perlu memprioritaskan ketahanan pangan tingkat rumah tangga/individu. Dalam hal ini peran serta pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama strategi peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah. Sementara itu pemerintah daerah lebih berperan sebagai fasilitator dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan tersebut adalah melalui pemberdayaan kelembagaan lokal seperti lumbung desa dan peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan pangan. Capaian kinerja tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Program

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan.	446.810.010,00	446.358.410,00	99,90
2.	Program Penguatan Cadangan Pangan.	505.331.825,00	504.358.443,00	99,81

Strategi yang dikembangkan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan antara lain:

1. peningkatan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan serta pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan .
2. penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan dan mempertahankan kesuburan tanah terjaga, penggunaan pestisida

untuk memberantas hama yang merusak tanaman, melakukan penanaman bibit unggul yang dapat menghasilkan produksi pangan yang tinggi, cepat dan tahan hama.

- mekanisme pertanian dalam upaya meningkatkan mutu hasil dan meningkatkan efisiensi usaha tani seperti penggunaan mesin penanam, traktor dan pompa irigasi.

Tujuan 6: Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik berinvestasi. Dengan dibangunnya kawasan industri diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut:

- Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kaveling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai.
- Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha.
- Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Pembangunan kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, bertujuan untuk:

- Mengendalikan pemanfaatan ruang.
- Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
- Mempercepat pertumbuhan industri di daerah.
- Meningkatkan daya saing industri.
- Meningkatkan daya saing investasi.
- Memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja, maka ditetapkan dua indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	2	41,53	2.076,50
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,88	70,04	109,64

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	23,10	21,86	41,53	10	415,3
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,81	64,62	70,04	64,15	109,18

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial adalah sebagai berikut:

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya serta bertujuan menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas tahun 2015 – 2020

TW	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
I	169.576.774.759	112.814.028.632	44.202.980.000	178.562.500.000	174.475.470.048	243.386.640.000
II	104.309.494.164	120.953.286.770	149.889.870.000	333.733.758.234	209.076.041.748	345.808.420.000
III	65.642.520.955	102.266.881.857	19.537.830.000	98.104.720.014	174.269.585.197	214.334.320.000
IV	270.006.455.714	109.620.425.890	294.065.470.000	14.579.221.752	203.800.287.880	274.426.400.000
Total	609.535.145.592	445.654.623.149	507.696.150.000	625.000.200.000	761.621.384.575	1.077.955.780.000

Sumber : DPMPTSP, 2020

Perkembangan investasi di Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Dilihat dari pertumbuhan nilai investasi untuk tahun 2020 dari tahun 2019 adalah sebesar 141,53 persen. Sedangkan persentase pertumbuhan nilai investasi daerah meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020 naik hingga mencapai 414,59 persen disebabkan :

1. Dilakukan upaya persuasif kepada para investor sehingga mereka yang belum melaporkan nilai investasinya bersedia melaporkannya ke DPMPTSP.
2. Dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP), menyebabkan perizinan menjadi cepat, sehingga menopang peningkatan realisasi investasi.
3. Untuk investor dengan perizinan yang kurang lengkap dapat segera dilayani di Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga menopang peningkatan realisasi investasi.

Realisasi investasi di Kabupaten Banyumas pada 2020 mencapai Rp1,077 triliun. Pencapaian ini melampaui target investasi baik dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun target yang telah ditentukan pemerintah pusat. Sesuai dengan target RPJMD dengan periode lima tahun sebesar Rp 260 miliar, sedangkan target investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp1,07 triliun. Capaian realisasi investasi tersebut pertama dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kontribusi dominan Rp 1,075 triliun (99,73 persen) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 2,926 miliar (0,27 persen).

Pencapaian realisasi investasi pada Tahun 2020 terdiri dari dari sektor primer (pertanian dan pengolahan hasil pertanian), sektor sekunder (kontruksi, industri dan pertambangan) serta sektor tersier (hotel, restoran, pergudangan, perdagangan dan jasa). Pencapaian investasi terbesar pada sektor tersier dengan nilai investasi Rp988.749.100.336,00 dari total investasi sebesar Rp1.077.955.780.832,00. Nilai capaian investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Jumlah Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor
Triwulan I-IV Tahun 2020**

NO	SEKTOR	PMA	PMDN	JUMLAH
1	SEKTOR PRIMER	-	205.000.000	205.000.000
2	SEKTOR SEKUNDER	1.133.280.495	87.868.400.000	89.001.680.495
3	SEKTOR TERSIER	1.792.800.336	986.956.300.000	988.749.100.336
JUMLAH		2.926.080.832	1.075.029.700.000	1.077.955.780.832

Sumber : DPMPTSP, 2020

Adapun faktor yang mempengaruhi investasi di Kabupaten Banyumas terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lingkungan internal:
 - a. tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah dibidang investasi serta kebijakan antara sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralitasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, semua itu

mengakibatkan ketidakpastian kebijakan investasi nasional, sehingga menurunkan niat untuk berinvestasi.

- b. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor.
- c. Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya .

2. Lingkungan eksternal yaitu ketidakpastian ekonomi global.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Banyumas antara lain:

- a. Mengembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan adanya Mal Pelayanan Publik, dimana proses perizinan dipermudah melalui sistem online.
- b. Menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait dengan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Banyumas.
- c. Mengembangkan kawasan peruntukkan industri dengan memprioritaskan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dan SKPD teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- e. Melaksanakan sosialisasi tentang informasi, pengaduan, data dan system informasi pelayanan perizinan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memiliki perizinan terhadap setiap usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.
- g. Mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan, serta PTSP bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh instansi terkait baik tingkat provinsi maupun pusat.
- h. Meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menjelaskan kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyumas, maka telah disusun Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 sebagai gambaran kondisi lingkungan hidup Kabupaten Banyumas terkini. Laporan tahun 2019 merupakan yang disusun di tahun 2020 dan berisikan data pengukuran/pemantauan kualitas lingkungan hidup sepanjang tahun 2019. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang tekanan terhadap lingkungan sebagai akibat timbulnya perubahan media lingkungan (air, udara, tutupan lahan) akibat dari kegiatan manusia. Selain itu juga menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah administrasi Kabupaten

Banyumas. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyusun/pengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mempunyai ruang lingkup yaitu:

- a. Konsep IKLH hanya mengambil 3 (tiga) indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan tutupan lahan selama 1 (satu) tahun dengan sumber data tahun 2019.
- b. Pembandingan atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan baku mutu air sungai dan baku mutu udara ambien.
- c. Analisis data yang digunakan untuk menghitung IKLH menggunakan kriteria, yaitu : (1) kualitas air yang diukur berdasarkan parameter-parameter DO, *fecal coliform*, COD, pH, BOD, NH₃-N, *total phospat*, TSS, NO₃-N dan TDS; (2) Kualitas udara yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂ ; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dihitung berdasarkan hasil pantauan kualitas air sungai prioritas, hasil pantauan kualitas udara ambien pada kawasan-kawasan transportasi, pemukiman, industri, dan komersial serta hasil analisis tutupan lahan dan dinamika vegetasi tahun 2019.

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat yang juga diiringi tumbuhnya sektor perindustrian, maka secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas maupun kuantitas dari air sebagai akibat dari pencemaran oleh berbagai polutan. Kualitas air sungai merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologis. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Di lain pihak, sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah, sehingga menyebabkan kualitas air sungai semakin menurun. Selain itu, dapat dikatakan bahwa isu pencemaran air merupakan masalah global, tidak saja dihadapi oleh Pemerintah Indonesia tetapi juga dihadapi oleh sebagian besar Negara-negara di dunia.

Kualitas air diindikasikan dari pengelolaan sumber daya air, termasuk dalam mencegah dan menanggulangi tingkat terjadinya pencemaran air dan sumber air. Air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena dijadikan sebagai sumber air minum. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Banyumas, dilakukan di 30 titik sungai di wilayah Kabupaten Banyumas yang dilakukan selama 3 kali dalam 1 tahun (bulan April, Agustus dan November). Sample kemudian diuji di laboratorium untuk diketahui

kadar DO (*Dissolved Oxygen*), *Fecal Coliform*, COD (*Chemical Oxygen Demand*), pH, BOD (*Biological Oxygen Demand*), NH₃-N, Total Phosphat, NO₃-N dan TDS (*Total Dissolved Solid*). Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dengan menggunakan metode indeks Pencemaran (*Pllution Index*) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah 59,33 dengan kategori sedang. Nilai IKA Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dari nilai IKA Provinsi Jawa Tengah yaitu 51,64.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kualitas udara ambien di Kabupaten Banyumas sangat dipengaruhi oleh kegiatan industri, perkantoran, pemukiman, dan transportasi. Dimana sumber pencemaran udara berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Beberapa polutan yang dihasilkan oleh kegiatan pabrik, kegiatan di pemukiman, perkantoran, dan transportasi berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂, dan partikulat. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan jumlah industri, pertumbuhan jumlah pemukiman dan perkantoran yang berakibat pada peningkatan kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi, serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Banyumas.

Pengukuran IKU dilakukan terhadap udara ambient yaitu udara bebas di permukaan bumi yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual *passive sampler*. Parameter yang dipantau adalah NO₂ (*nitrogen dioxide*) dan SO₂ (*sulfur dioxide*). Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali setahun yang dianggap dapat mewakili kualitas udara pada musim hujan dan musim kemarau. Metode perhitungan IKU dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*. IKU Kabupaten Banyumas adalah 85,07 dengan kategori sangat baik. IKU Kabupaten Banyumas masih di atas IKU provinsi Jawa Tengah dan IKU nasional dimana IKU Provinsi Jawa Tengah yaitu 84,81 sedangkan IKU nasional yaitu 84.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng > 25 persen (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan IKTL ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3 persen dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yaitu 70,04, sehingga disimpulkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2020 termasuk dalam kategori **BAIK**. Nilai IKLH tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKLH pada tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan metode perhitungan pada IKA dan IKTL. Nilai IKLH Kabupaten Banyumas di atas nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah yaitu 60,97 dan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Nasional yaitu 66,55.

Tujuan 7: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, maka ditetapkan satu indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Indeks daya Saing Infrastruktur	Indeks	80,01	67,38	84,21

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Indeks daya Saing Infrastruktur	Indeks	70,88	65,48	67,38	82,56	81,61

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

Indeks Daya Saing Infrastruktur

Indeks Daya Saing infrastruktur merupakan suatu indeks yang menggambarkan tentang kondisi infrastruktur di suatu daerah dengan

capaian dari masing-masing komponen. Indeks Daya Saing Infrastruktur tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Kinerja makro urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu dari sebesar 50,97 persen menjadi 60,44 persen. Sedangkan pada tahun 2016 kinerja panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 30,28 persen dan mengalami kenaikan lagi menjadi 34,96 persen di tahun 2017. Hal ini didasarkan pada penambahan ruas jalan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Banyumas Nomor 620/302 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten. Berdasarkan SK tersebut panjang jaringan jalan Kabupaten Banyumas mulai tahun 2016 menjadi 1.508 km dari sebelumnya 804,784 km. Sebagian besar penambahan ruas jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan antar desa yang kondisinya sebagian besar rusak. Pada tahun 2020 panjang jalan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel Kondisi Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Kondisi	Panjang	%	Kondisi		
Baik	679,15	45,04	1.027,00	68,13	Mantap
Sedang	348,31	23,10			
Rusak ringan	460,04	30,51	480,54	31,87	Tidak mantap
Rusak berat	20,50	1,36			
Jumlah	1.508,00	100,00	1.508,00	100,00	

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2020.

Berdasarkan data di atas, tahun 2020 kondisi panjang jalan dalam keadaan baik menjadi 45,04 persen, sementara yang sedang sebesar 23,10 persen, sehingga kondisi panjang jalan dalam kondisi mantap menjadi sebesar 68,13 persen. Secara rinci capaian kinerja panjang jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap
Dari Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Panjang jalan kabupaten	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	30,25	34,96	35,47	35,47	45,04
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (%)	21,46	20,95	23,53	23,83	23,10
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan (%)	29,57	27,63	22,09	19,39	30,51
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (%)	18,72	16,46	18,92	16,91	1,36

umber: DPU Kabupaten Banyumas, 2020.

Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang urusan pekerjaan umum beberapa hal menjadi perhatian di Kabupaten Banyumas yaitu, peningkatan jalan yang rusak berat, perbaikan jalan menjadi baik sehingga akan meningkatkan kemantapan kondisi jalan, serta perbaikan bangunan irigasi yang rusak dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian.

Persentase rumah tinggal pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, berdampak terhadap peningkatan permukiman, meliputi rumah dan perumahan, peningkatan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi. Di samping permasalahan ketersediaan perumahan Kabupaten Banyumas juga menghadapi permasalahan banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. Dari sisi pelayanan air bersih dan sanitasi cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih meningkat namun capaiannya baru mencapai sebesar 74,22 persen pada tahun 2020. Cakupan rumah tangga bersanitasi juga mengalami peningkatan, namun sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 88,45 persen. Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi tersebut masih lebih rendah dari target *universal access* sebesar 100 persen. Mulai tahun 2018-2020 cakupan sanitasi menggunakan data STBM (Kemenkes) sehingga mengalami kenaikan yang cukup signifikan

Selengkapnya capaian perkembangan kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Kinerja Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih
Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	303.139	311.139	322.466	331.360	334.674	337.553
2.	Persentase rumah tangga	67,97	68,91	70,54	72,67	73,71	74,22

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
	memiliki akses air bersih (%)						
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	66,72	67,96	75,33	82,88	87,79	88,45

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2020.

Berdasarkan target *universal access* 100-0-100 sesuai dengan RPJMN 2020-2025 mengamanatkan bahwa di tahun 2020 seluruh masyarakat harus memiliki akses air minum dan sanitasi layak, terlebih pada tahun tersebut Indonesia telah menargetkan untuk menjadi *middle income country* yaitu negara berpenghasilan menengah.

Secara umum terdapat gap yang cukup besar antara target indikator kinerja terkait pembangunan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh dalam RPJMD Kabupaten Banyumas dengan target *universal access* 100-0-100 dikarenakan target dalam RPJMD Kabupaten Banyumas telah disusun lebih dahulu sebelum RPJMN 2020-2025 dan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Lebih lanjut pembangunan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh tidak hanya untuk memenuhi target *universal access* tetapi juga untuk memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's.

Sarana Perhubungan (Terminal)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SK Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C, di Banyumas terdapat infrastruktur perhubungan darat yang terdiri dari 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Pembangunan terminal khususnya Tipe C terus dilakukan untuk memberi pelayanan akses transportasi masyarakat yang ada di wilayah untuk melakukan aktivitasnya. Kebutuhan terminal yang ada di Kabupaten Banyumas sejumlah 8 (delapan) unit, namun baru terealisasi sebanyak 3 (tiga) unit, atau capainnya mencapai 37,5 persen. Adapun fasilitas terminal yang ada di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel Fasilitas Terminal di Kabupaten Banyumas

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah	Lokasi
1.	Jumlah Terminal Kelas A (unit)	1	Purwokerto
2.	Jumlah Terminal Kelas B (unit)	-	-
3.	Jumlah Terminal Kelas C (unit)	2	Wangon, Ajibarang

Permasalahan terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur yang optimal membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar.
2. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dalam pembangunan sektor infrastruktur antara lain pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa.

3. Cakupan pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Banyumas belum menjangkau seluruh penduduk. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna memberikan akses menyeluruh air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni bagi penduduk Kabupaten Banyumas. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi semakin penting karena merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi:

1. Perlu dikembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastuktur melalui KPBU dan CSR.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang bersifat konkuren.
3. Pembangunan infrastruktur terutama dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik lebih diprioritaskan.

Tujuan 8: Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi, maka ditetapkan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	%	5.86	-61,85	-1.055,46
Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	5	5,65	113
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,23	6	58,16

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	%	11,91	51,53	-61,85	48,48	0
Persentase Pertumbuhan Industri	%	NA	0	5,65	15	37,07

Kreatif							
Tingkat Terbuka	Pengangguran	%	4,49	4,21	6	3,76	159.57

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)

Kinerja makro urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dari kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, dan umumnya mudah dijangkau karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa obyek wisata yang belum tergarap secara optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya.

Di samping obyek wisata tersebut Kabupaten Banyumas juga memiliki berbagai potensi pariwisata yang belum dikembangkan antara lain: wisata edukasi geologi di Kawasan Wisata Baturraden, wisata alam air terjun /curug di beberapa kecamatan, wisata budaya dan *heritage* di Kawasan Kota Lama Banyumas, wisata alam Sungai Serayu. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banyumas.

Pada tahun 2020 ini, kota lama Banyumas direkomendasikan menjadi kawasan cagar budaya, karena Kecamatan Banyumas merupakan kawasan yang bersejarah dan masih meninggalkan ratusan bangunan maupun arsitektur dengan tata ruang yang memiliki karakter tersendiri, dimana dari hasil inventarisasi ditemukan 104(seratus empat) bangunan dan arsitektur peninggalan sejarah yang sebagian kecil bangunan sudah terdaftar sebagai cagar budaya peringkat nasional maupun kabupaten.

Infrastruktur pendukung pariwisata seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia. Obyek wisata di Kabupaten Banyumas berkembang dengan pesat, dari sebanyak 20 (dua puluh) obyek di tahun 2018 menjadi 51 (lima puluh satu) obyek di tahun 2020.

Adapun data obyek wisata di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan | 27. Kph.T.C.Cipendok |
| 2. Taman Balai Kamambang | 28. Kph.T.C.Gomblang |
| 3. THR Pangsar Sudirman | 29. Kph.T.klpgu.Jenggala |
| 4. Kalibacin | 30. Kph.T.b.p.Munggang |
| 5. Baturraden | 31. Kph.T.C.Bayan |
| 6. Dreamland | 32. Kph.T.Limpakuwus |
| 7. Palawi Wanawisata | 33. Kph.T.C.song |
| 8. Palawi P3 | 34. Kph wana pramuka |
| 9. Palawi P7 | 35. Kph. Telaga Kumpe |
| 10. Palawi Telaga Sunyi | 36. Outbond candi |
| | 37. Griya Wisata Karangmangu |

11. Small World
12. Curug Telu Karangsalam
13. The Forest
14. Caping Park
15. The Village
16. Pereng
17. M. Sendang Mas
18. Watugede, Kalisalak
19. Wadas Tumpang
20. MSTB Cikakak
21. Batu Jonggol
22. Bukit Kendalisada
23. Bumper Kendalisada
24. Curug Gemawang
25. KphB.C Wanasuta
26. KphT. Watu Meja
38. Curug Nangga
39. Watu Kumpul
40. Wisata Germanggis
41. Kolam Renang Karang Tirta
42. Prawita garden
43. Taman Otcha
44. Kaliung
45. Pertapan Gerduren
46. Greenstone karangsalam
47. C.A.U.B Karangsalam
48. Gunung Laos
49. Paguyuban Melung
50. Kolam Renang Sentana
51. Lorong Blothong

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mendukung pencapaian indikator urusan pariwisata melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 8 (delapan) dan pada tahun 2020 bertambah 7 desa sehingga menjadi 15 (lima belas) desa dari 301 (tiga ratus satu) desa yang ada. Pengembangan desa wisata sangat potensial untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Upaya ini telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023.

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan fluktuatif, dengan kunjungan obyek wisata terbanyak pada obyek wisata Baturraden. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini, terjadi penurunan secara drastis bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas.

Perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas
Tahun 2015 – 2020

Uraian	Satuan	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Jumlah Kunjungan wisata	orang	1.784.378	2.013.992	2.111.865	2.363.002	3.580.743	1.866.157
a. Wisatawan Nusantara	orang	1.784.018	2.013.544	2.111.367	2.111.367	3.580.485	1.866.083
b. Wisatawan Mancanegara	orang	360	448	498	498	258	74

Sumber : Dinporabudpar, 2020

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisata tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah wisatawan tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis sebanyak 61,85 persen dari 3.580.743 kunjungan wisata

pada tahun 2019 menjadi 1.866.157 kunjungan wisata pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 yang berdampak bagi sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas. Penurunan kunjungan wisata disebabkan antara lain:

1. Adanya penutupan seluruh obyek wisata di Kabupaten Banyumas karena COVID-19 mulai Triwulan II tahun 2020.
2. Tidak adanya *event* wisata maupun budaya karena ada pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah pusat.
3. Adanya Surat Edaran Bupati Banyumas tentang pembatasan jumlah kunjungan dibawah 50 persen dari kapasitas dan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas menerapkan kunjungan rata-rata 40 persen.

Dalam rangka meningkatkan pariwisata dan jumlah wisawatan serta obyek wisata di masa pandemi COVID-19, hal-hal yang dilaksanakan antara lain:

1. Pembebasan pajak hotel dan restoran.
2. Pengurangan biaya/tarif masuk ke lokasi pariwisata.
3. Memasarkan destinasi wisata di Kabupaten Banyumas baik melalui media cetak dan online.
4. Meningkatkan paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalanannya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya.
5. Meningkatkan potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan *heritage* sehingga mendorong perkembangan pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Banyumas.
6. Mengembangkan produk wisata non fisik sebagai pendukung, antara lain meliputi kerajinan, kuliner, dan produk-produk kreatif lainnya.

Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif

Dewasa ini, ekonomi berkembang tidak hanya melalui sektor yang besar seperti manufaktur, namun sudah jauh bergerak ke ranah yang lebih luas. Lebih jauh, sumber daya manusia yang termasuk di dalamnya ide dan gagasan kreatif berkembang dan digunakan untuk menciptakan suatu produk yang dapat memiliki nilai tambah yang tinggi.

Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya, tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Kreatifitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

Industri kreatif di Kabupaten Banyumas mulai ditargetkan pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 baru dilaksanakan langkah-langkah agar industri kreatif di Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan dan jumlah industri kreatif semakin berkembang di tahun 2020. Adapun data industri kreatif yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.141 meningkat 61 buah dibandingkan tahun 2019, dengan jumlah industri kreatif sebagai berikut:

Tabel Data Industri Kreatif di Kabupaten Banyumas

No	Jenis Industri Kreatif	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	<i>Advertising</i>	-	7
2.	Jasa arsitektur	-	-
3.	Kerajinan/ <i>craft</i>	950	981
4.	Desain (grafis, interior, dsb)	-	-
5.	Pakaian / <i>fashion</i>	6	35
6.	Video/film/fotografi	100	100
7.	Permainan interaktif	-	-
8.	Musik	-	-
9.	Penerbitan dan percetakan	14	8
10.	Layanan komputer	10	10
Jumlah		1.080	1.141

Sumber: Dinperindag, data diolah 2020

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif, langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

1. Peningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaku industri kreatif, dengan melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi/pendampingan dalam rangka pengembangan industri kreatif.
2. Peningkatan penggunaan teknologi dalam mengembangkan industri kreatif.
3. Fasilitasi event-event pameran, baik tingkat provinsi dan nasional dalam rangka pemasaran produk dan menumbuhkan pangsa pasar bagi industri kreatif.

Tingkat Pengangguran Terbuka

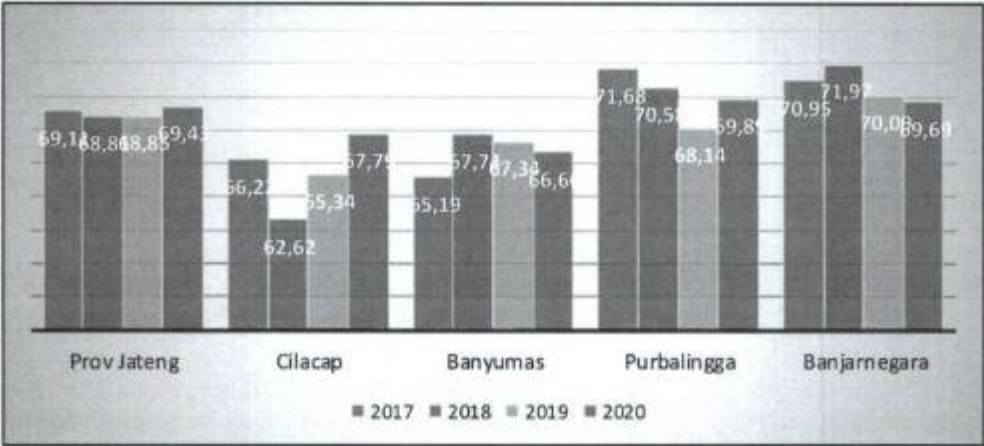
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) memberi indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Banyumas Tahun 2020 tercatat 6 persen yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang menganggur. TPT tahun 2020 naik 1,84 persen dibandingkan tahun 2019 dimana TPT-nya tercatat 4,17 persen. Penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 antara lain:

1. Adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Berkurangnya kesempatan kerja (lowongan kerja berkurang) sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor formal sangat kurang sedangkan angkatan kerja semakin bertambah.
3. Penempatan hasil *job fair* 2020 sebagian besar ditunda/dibatalkan karena perusahaan terdampak COVID-19.
4. Dari bulan Maret hingga September 2020, penempatan pekerja migran Indonesia ditutup dan bulan September 2020 telah dibuka kembali tetapi hanya untuk beberapa negara dan job tertentu saja.

Angkatan Kerja (AK) Kabupaten Banyumas tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019, karena belum rilis dari BPS, dimana AK

Kabupaten Banyumas sebesar 868.553 orang. AK dihitung berdasarkan jumlah orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Sementara untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2020 sebesar 66,66 persen. Adapun capaian apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang lain adalah sebagai berikut:

Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga Tahun 2017 - 2020



Sumber: BPS Propinsi Jateng tahun 2020

Sementara untuk jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 – 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Angkatan Kerja
Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga
Tahun 2017 - 2019

Wilayah	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkt. Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkatan Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prov Jateng	17.186.674	823.938	18.010.612	17.245.548	814.347	18.059.895	17.441.153	819.355	18.260.508
Cilacap	788.414	52.992	841.406	739.602	59.801	799.403	780.198	61.491	841.689
Banyumas	785.231	38.048	823.279	827.086	36.138	863.224	832.017	36.536	868.553
Purbalingga	463.809	26.138	489.947	457.918	29.522	487.440	454.098	22.798	476.896
Banjarnegara	464.432	23.025	487.457	478.171	19.915	498.086	467.345	21.876	489.221

Sumber : BPS Propinsi Jateng , 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari tahun 2017 – 2019 adalah sebagai berikut:

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 - 2020



Sumber: BPS Propinsi Jateng, 2020

Sebagai dampak pandemi COVID-19, di Kabupaten Banyumas terjadi Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 324 orang, pekerja yang dirumahkan sebanyak 2.388 orang dan jumlah pengangguran tahun 2020 naik sebanyak 7.761 orang menjadi 45.683 orang dibanding tahun 2019 sebanyak 37.922 orang (data Dinsosnakertrans 2020). Dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran terbuka, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang sesuai dengan kemampuan kebanyakan masyarakat tersebut ditambah dengan sumberdaya yang tersedia. Selain itu diberikan modal yang akan digunakan untuk menunjang usaha tersebut.
2. Memperluas kesempatan kerja dengan cara memanfaatkan usaha-usaha yang mampu menyerap pekerja yang banyak/padat karya.
3. Mempermudah izin usaha, terutama UMKM yang saat ini masih sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat.
4. Melatih para pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja sendiri/wirasawasta sehingga tidak bergantung pada pengguna tenaga kerja.
5. Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan kemasyarakatan.
6. Memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagai motivasi para pencari kerja untuk mengetahui pekerjaan atau usaha sesuai dengan bakat minatnya.
7. Melaksanakan pameran kesempatan kerja (*Job Fair*).
8. Mencari peluang kerja /kesempatan kerja baik di Kabupaten Banyumas maupun di luar Kabupaten Banyumas.
9. Penguatan lembaga penempatan baik di dalam maupun di luar negeri.

Tujuan 9: Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, maka ditetapkan 4 (empat) indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	5	7,14	142,80
Angka Kriminalitas	kasus	792	727	108,21
Indeks Demokrasi	indeks	79,3	77,22	97,38
Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	47,47	46,30	97,54

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	NA	6,6	7,14	25	26,40
Angka Kriminalitas	kasus	677	831	727	950	112,53
Indeks Demokrasi	indeks	74,46	72,12	77,22	86	83,86
Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	NA	32,87	46,30	100	32,87

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka meningkatkan akutalisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

Persentase Penurunan Konflik Sosial

Pengertian dari konflik sosial dapat diartikan sebagai perubahan sikap dalam masyarakat yang mengakibatkan pada terkikisnya kesatuan (integrasi) social. Konflik ini tidak hanya datang dari dalam masyarakat, tetapi dapat juga dari luar masyarakat oleh karenanya banyak yang mengatakan bahwa konflik social adalah salah satu faktor pendorong perubahan social. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat meliputi konflik SARA dan konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Adapun penurunan angka konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebesar 7,14 persen dari target sebesar 5 persen sehingga capaiannya adalah 125 persen. Angka konflik SARA dan angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM yang terjadi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 semakin menurun, sehingga mengindikasi semakin baiknya kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM di Kabupaten Banyumas. Adapun angka konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM adalah sebagai berikut:

Tabel Angka konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target (kasus)	Realisasi (kasus)	Capaian (%)	Target (kasus)	Realisasi (kasus)	Capaian %	Target (kasus)	Realisasi (kasus)	Capaian %
1.	Angka konflik SARA	10	7	142	22	2	190,91	18	1	188,89
2.	Angka konflik IPOLEKSOSB UD-HANKAM	12	8	150	14	12	114,29	12	12	100,00
Rata-rata capaian				146			152,6			144,44

Sumber : Bakesbangpol, 2020

Pengendalian suatu konflik hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai pihak yang berkonflik terorganisir secara jelas. Menekan sebuah konflik agar tidak berlanjut menjadi sebuah tindak kekerasan memerlukan strategi pendekatan yang tepat. Dalam rangka pengendalian konflik, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah-langkah diantaranya meliputi:

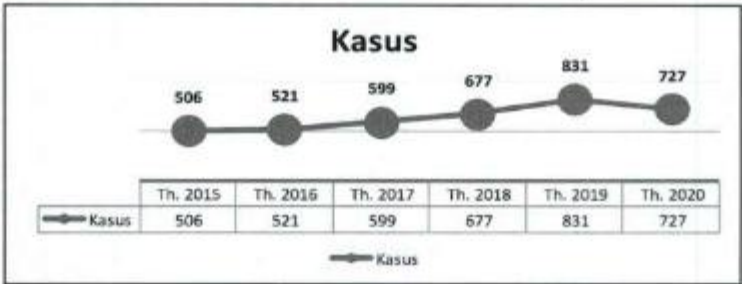
1. Melakukan konsiliasi yang merupakan bentuk pengendalian konflik sosial melalui lembaga-lembaga tertentu misalnya lembaga perwakilan rakyat (DPRD) yang dapat memberikan keputusan yang adil. Dalam konsiliasi berbagai kelompok yang berkonflik duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan.
2. Melakukan Arbitrasi yang merupakan bentuk pengendalian konflik social melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak yang berkonflik menyetujuinya. Keputusan-keputusan yang diambil pihak ketiga harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik.
3. Melakukan Mediasi yang merupakan bentuk pengendalian konflik sosial dimana pihak-pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.

Angka Kriminalitas

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu aspek pendukung iklim berinvestasi. Keamanan wilayah tercermin dari Angka kriminalitas yaitu banyaknya perkara pidana yang masuk di Pengadilan. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 831 kasus, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 727 kasus.

Perkembangan jumlah kasus kriminalitas selama tahun 2015-2020 adalah terlihat pada tabel berikut:

Grafik Jumlah Kasus Kriminalitas di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020



Sumber: Bakesbang Kab. Banyumas, 2020

Dalam rangka menurunkan angka kriminalitas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar antara lain dengan menggalakkan ronda malam (siskamling) dan pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling).
2. Meningkatkan peran serta pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.
3. Memberlakukan aturan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.
4. Menumbuhkan kerja sama yang solid antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sebagai upaya pencegahan preventif.

Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Metodologi penghitungan indeks demokrasi menggunakan 4 (empat) sumber data yaitu Review surat kabar lokal, Review dokumen (perda, perbup dan lain-lain), *Focus Group Discussion* FGD), Wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi tahun 2020 masih mengacu pada Indeks Demokrasi tahun 2019 karena nilai indeks tahun 2020 belum rilis, dimana nilai indeks demokrasi berdasarkan Nilai Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Tengah. Nilai indeks pada tahun 2020 adalah 77,22 naik 5,1 dibandingkan tahun 2019 dimana indeks demokrasinya di angka 72,12, termasuk dalam kategori "Sedang". Nilai Indeks Demokrasi masih di atas indeks demokrasi nasional sebesar 74,92.

Dalam rangka meningkatkan nilai indeks demokrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan langkah-langkah diantaranya dengan:

1. Transparansi anggaran (APBD) dalam berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti website pemerintah dan sebagainya.
2. Membuat "Lapak Aduan" yang disediakan oleh Pemerintah dalam menggali aduan/usulan/pendapat masyarakat.
3. Mengurangi tingkat kekerasan/kerusakan dalam demonstrasi (unjuk rasa oleh masyarakat) baik kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun oleh masyarakat pelaku demonstrasi.
4. Mengurangi penggunaan dana bantuan keuangan partai politik untuk operasional partai politik.
5. Meningkatkan peran serta dari unsur masyarakat, akademisi, aktivis, LSM dan pekerja media yang juga aktif.

Persentase Pelestarian Budaya Banyumas

Sebagai tonggak penunjang berdirinya kebudayaan nasional di Indonesia, kebudayaan daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain semakin melunturnya nilai-nilai serta penghargaan terhadap kebudayaan daerah itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan semakin lunturnya minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal adalah minimnya usaha pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah, serta menguatnya gempuran budaya asing yang masuk melalui saluran teknologi informasi yang semakin bebas dan cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengantisipasi

permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa program kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pelestarian dan juga pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan kebudayaan lokal beserta dengan unsur yang terbentuk di dalamnya.

Dalam rangka melestarikan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang rutin digelar setiap tahun. Penyelenggaraan festival seni dan budaya antara lain menampilkan pagelaran kesenian buncis karawitan, calung dan macapat, serta beberapa kebudayaan lain seperti wayang kulit, lengger dan kesenian kenthongan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat cukup signifikan, namun kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Tema maupun isi setiap festival perlu dipertajam, sehingga jelas perbedaan antara masing-masing festival. Pemasaran untuk setiap event tersebut juga perlu dikoordinasi dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar mampu menarik wisatawan seluas-luasnya.

Dukungan pemerintah dalam rangka memberikan ruang untuk mengekspresikan bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pembangunan dan penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Dalam rangka menjaga serta melestarikan beberapa benda bersejarah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya. Hingga tahun 2020 tercatat 60 (enam puluh) benda bersejarah, berupa benda, situs dan kawasan cagar budaya telah mendapatkan tindakan pelestarian/konservasi. Pembinaan terhadap unsur kebudayaan dan seni juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Jumlah kelompok kesenian di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sebanyak 10.079 jumlah kelompok.

Adapun persentase pelestarian budaya meliputi persentase pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sebesar 36,00 persen ditambah dengan persentase jenis kesenian yang ada sebesar 56,60 persen, sehingga total persentase rata-rata pelestarian budaya banyumas sebesar 46,30 persen. Adapun gambaran pelestarian budaya dapat dilihat pada capaian indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Pelestarian Budaya Banyumas dari Tahun 2015-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja					
		Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020
1.	Penyelenggaraan budaya festival seni dan budaya (kali)	9	5	24	24	200	30
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	5	6	6	6	6	6
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	59	59	59	59	59	60
4.	Jumlah grup kesenian (kelompok)	1.633	1.633	1.633	1.633	1.717	10.079
5.	Jumlah grup kesenian yang telah dibina (kelompok)	135	157	157	157	200	201
6.	Jumlah seniman (orang)						
	- Penari	1.529	1.529	1.529	1.529	8.250	8.525
	- Pemain Teater	900	900	900	900	7.400	7.405
	- Pelukis	112	112	112	112	112	112
	- Pemusik	5.983	5.983	5.983	5.983	6.300	6.300

Sumber : Dinporabudpar, 2020

Permasalahan yang terjadi terkait dengan pertumbuhan kelompok seni dan budaya tradisional, diantaranya karena masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing ke suatu Negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa. Namun pada kenyataannya budaya asing mulai mendominasi sehingga budaya lokal mulai dilupakan. Faktor lain yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan dari budaya lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tugas utama yang perlu dibenahi adalah bagaimana mempertahankan, melestarikan, menjaga serta mewarisi budaya lokal dengan sebaik-baiknya agar dapat memperkuat budaya bangsa yang akan mengharumkan nama daerah, dan agar budaya asli daerah tidak diklaim oleh daerah yang lain.

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2020

	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	633.302.968.814	668.211.148.299	105,51
Pendapatan Transfer	2.492.686.941.037	2.461.625.946.893	98,75
Lain-lain Pendapatan yang Sah	214.287.967.000	200.349.693.050	93,50
Jumlah Pendapatan	3.340.277.876.851	3.330.186.788.242	99,70
Belanja Operasi	2.496.644.645.376	2.241.998.515.846	89,80
Belanja Modal	394.760.974.622	363.470.409.584	92,07
Belanja Tak Terduga	102.752.466.821	81.006.096.422	78,84
Jumlah Belanja	2.994.158.086.819	2.686.475.021.852	89,72
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	26.156.571.346	26.156.571.346	100,00
Transfer Bantuan Keuangan	536.518.342.167	536.510.342.166	100,00
Jumlah Transfer	562.674.913.513	562.666.913.512	100,00
SURPLUS/(DEFISIT)	-	81.044.852.878	-37,42
Penerimaan Pembiayaan	247.705.123.481	242.705.123.481	97,98
Pengeluaran Pembiayaan	31.150.000.000	29.519.500.000	94,77
Pembiayaan Netto	216.555.123.481	213.185.623.481	98,44
SILPA	-	294.230.476.359	∞

Sumber : BKAD Kabupaten Banyumas,2020

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas per tujuan/sasaran strategis Tahun 2020

NO	TUJUAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	105.788.277.889	92.587.114.976	87,52
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	837.051.570.000	698.532.734.355	83,45
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	15.406.593.664	9.962.746.360	64,67
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	21.583.641.305	15.006.533.892	69,53
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	952.141.835	950.716.853	99,85
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	26.242.076.797	24.016.640.949	91,52
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	246.787.708.801	234.668.175.711	95,09
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	8.943.823.932	6.679.102.417	74,68
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	10.538.930.167	9.238.403.467	87,66
JUMLAH		1.273.294.764.390	1.091.642.168.980	85,73

ANALISIS EFEKTIVITAS

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020					
No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	MISI 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat				
1.	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	101,12	92.587.114.976	87,52
	MISI 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok				
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	99,21	698.532.734.355	83,45
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	4	82,86	9.962.746.360	64,67
	MISI 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan				
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	51,34	15.006.533.892	69,53
	MISI 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan				
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	107,11	950.716.853	99,85
	MISI 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan				
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	2	1.093,07	24.016.640.949	91,52
	MISI 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan				
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	84,21	234.668.175.711	95,09
	MISI 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal				
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	3	57,05	6.679.102.417	74,68
	MISI 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious				
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat.	4	111,48	9.238.403.467	87,66

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

ANALISI EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100 persen. Terlihat mayoritas dari 9 (Sembilan) tujuan/sasaran strategis, 5 (lima) tujuan/sasaran strategis sama atau lebih dari 100 persen. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
	MISI 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.				
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik.	1	101,12	87,52	13,6
	MISI 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok.				
2	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.	1	99,21	83,45	-
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	4	82,86	64,67	-
	MISI 3 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.				
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian.	2	51,34	69,53	-
	MISI 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan				
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	107,11	99,85	7,26
	MISI 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.				
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	2	1.093,07	91,52	1.001,55
	MISI 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.				
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.	1	84,21	95,09	-
	MISI 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal				

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	3	57,05	74,68	-
MISI 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.					
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat.	4	111,48	87,66	23,82

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas diketahui bahwa terdapat 5 (lima) tujuan/sasaran strategis memperoleh hasil persentase rata-rata capaian kinerja melebihi realisasi persentase anggaran, sedangkan 4 (empat) tujuan/sasaran strategis masih kurang efisien, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Efisiensi penggunaan sumber daya tertinggi dicapai pada tujuan ke-6 (enam) yaitu Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dimana realisasi anggaran sebesar 91,52 persen dapat mencapai prosentase capaian kinerja sebesar 1.093,07 persen. Efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dilakukan upaya persuasif kepada para investor sehingga mereka yang belum melaporkan nilai investasinya bersedia melaporkannya kepada DPMPTSP.
- 2) Dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP), menyebabkan perizinan menjadi cepat, sehingga menopang peningkatan realisasi investasi.
- 3) Untuk investor dengan perizinan yang kurang lengkap dapat segera dilayani di Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga menopang peningkatan realisasi investasi.
- 4) Dukungan dan peran serta pihak swasta terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak juga terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 paling rendah pada tujuan ke-3, dimana dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB dan Nilai Tukar Petani, realisasi persentase pertumbuhan PDRB minus 1,65, sedangkan pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 6,32 persen. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan negatif di tingkat nasional dan propinsi Jawa Tengah dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

c. Pada tujuan ke-8 (delapan) yaitu menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana prosentase realisasi anggaran sebesar 74,68 persen sedangkan prosentase rata-rata capaian kinerja sebesar 57,05 persen. Rendahkan efisiensi pada tujuan ke-8 (delapan) disebabkan oleh antara lain:

- 1) Adanya penutupan seluruh obyek wisata di Kabupaten Banyumas karena COVID-19 mulai triwulan II tahun 2020.
- 2) Tidak adanya event wisata maupun budaya karena ada pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah pusat.

- 3) Adanya Surat Edaran Bupati Banyumas tentang pembatasan jumlah kunjungan dibawah 50% dari kapasitas dan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas menerapkan kunjungan rata-rata 40%.
- 4) Adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .
- 5) Berkurangnya kesempatan kerja (lowongan kerja berkurang) sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor formal sangat kurang sedangkan angkatan kerja semakin bertambah.
- 6) Penempatan hasil *job fair* 2020 sebagian besar ditunda/dibatalkan karena perusahaan terdampak COVID-19.
- 7) Dari bulan Maret hingga September 2020, penempatan pekerja migran Indonesia ditutup dan bulan September 2020 telah dibuka kembali tetapi hanya untuk beberapa negara dan *job* tertentu saja.

Analisis program yang mendukung pencapaian target kinerja

- a. Keberhasilan pencapaian kinerja tertinggi salah satunya dukungan program dan kegiatan. Dalam urusan investasi, didukung oleh program peningkatan iklim invenstasi dan realisasi investasi, program peningkatan promosi dan kerjsama investasi, program potensi sumber daya, sarana dan prasaran daerah. Dengan adanya program-program tersebut, maka kegiatan untuk menggalakkan investasi dan promosi pengembangan investasi dengan menggandeng sektor swasta dapat terlaksana.
- b. Program lain yang mendukung capaian kinerja yaitu Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program pengelolaan ruang terbuka hijau, dimana dengan program-program tersebut maka Kabupaten Banyumas dapat menjaga kondisi lingkungan hidup agar sesuai dengan baku mutu yang ditentukan.

PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

- a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebanyak 149 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp184.792.473.552,72. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa setelah dilakukan negosiasi didapat nilai kontrak sebesar Rp171.177.110.091,40, sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang jasa sebesar Rp13.615.363.461,32 atau sebesar 7,37 persen dari total HPS.

HPS (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi %
184.792.473.552,72	171.177.110.091,40	13.615.363.461,32	7,37

- b. Pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog dilakukan pengadaan dengan *e-Purchasing*. Pada tahun 2020 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* sebanyak 198 paket dengan total rencana pengadaan sebesar Rp 60.307.577.137,00 dan realisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* setelah dilakukan negosiasi turun menjadi Rp57.624.587.899,00 sehingga terdapat efisiensi

pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* Rp2.682.989.238,00 atau sebesar 4,45 persen.

HPS (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi %
60.307.577.137,00	57.624.587.899,00	2.682.989.238,00	4,45

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM MASA PENDEMI COVID-19

Sudah lebih dari sembilan bulan sejak Maret hingga Desember 2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19. Sepanjang semester I tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan menangani pandemi COVID-19 dengan titik berat pada sektor kesehatan. Hal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain, menerbitkan berbagai aturan dan protokol/panduan kesehatan, kampanye cuci tangan-penggunaan masker-jaga jarak secara masif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah, melarang mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes COVID-19, menjalankan tes COVID-19 di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru.

Melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada semester I-2020, pemerintah terus melakukan upaya menghentikan laju kenaikan kasus pada semester II-2020 dengan memperluas cakupan strategi, yakni memasukkan penanganan dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Di bidang kesehatan, pemerintah terus mengampanyekan perilaku 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun

Pada 20 Juli 2020, pemerintah, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut memperluas jangkauan dan tugas yang selama ini diemban oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas COVID-19). Di dalam komite tersebut, terdapat Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (STPC-19), serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Dengan perpres tersebut, nama Gugus Tugas COVID-19 diubah menjadi STPC-19 dengan fungsi dan struktur yang sama.

Dengan perluasan strategi kebijakan tersebut, upaya mengatasi COVID-19 di bidang kesehatan tetap terus dijalankan. Upaya ini sejalan dengan dua tujuan umum penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO, yakni menurunkan penyebaran COVID-19 dan mengurangi kematian karena COVID-19. Berbagai kegiatan untuk menurunkan penyebaran virus dapat dirangkum dalam lima kata kunci, yakni temukan, tes, isolasi kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. Sedangkan, kegiatan untuk mengurangi kematian ditempuh dengan memperluas layanan kesehatan, menambah sarana kesehatan penting/vital, serta memperkuat tenaga medis.

Dalam rangka upaya mencegah, meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan agar sistem pemerintahan daerah tetap

berjalan maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan mengatur tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home=WFH*), dengan jadwal diatur disesuaikan dengan kondisi covid di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk satuan kerja bidang kesehatan dalam hal ini tenaga pelayanan kesehatan di rumah sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan tetap melaksanakan tugas di kantor agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar.
3. Melakukan pembatasan kegiatan kegiatan/rapat yang mengumpulkan orang.
4. Melakukan penundaan kegiatan dinas luar kota dan/atau luar negeri.
5. Melakukan pembatasan pertemuan dengan tamu dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan kunjungan dari luar daerah dan/atau luar negeri kecuali terkait dengan koordinasi pencegahan COVID-19 atau atas seijin Bupati.
6. Menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor antara lain memakai masker atau penutup mulut/hidung, mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak minimal 2 meter dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) untuk mencegah penularan COVID-19.
7. Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dinas secara *online/daring*.

Strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penanganan COVID-19, pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar 60% pada semua perangkat daerah.
2. Penjadwalan ulang program dan kegiatan tahun anggaran 2020.
3. Melaksanakan *refocusing* anggaran COVID-19. Adapun rincian anggaran *refocusing* COVID-19 sebagai berikut :

Tabel Komposisi *Refocusing* dalam rangka COVID-19 Tahun 2020

	PAGU	PAGU setelah <i>Refocusing</i>	REALISASI	%
BELANJA DAERAH	3.743.918.763.744	3.524.641.967.185	917.584.788.282	26,12
PENDAPATAN DAERAH	3.568.568.763.744	3.349.291.967.185	1.317.215.129.007	39,33

Sumber : BKAD Kabupaten Banyumas, 2020

Dalam rangka menangani pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan sarana prasarana untuk kasus COVID-19, antara lain:

1. Rumah Sakit Kerjasama Lini 1: 2 (dua) Rumah Sakit (RSUD Margono Sukarjo dan RSUD Banyumas);
2. Rumah Sakit Kerjasama Lini 2: RST WIJAYAKUSUMA;
3. Rumah Sakit Kerjasama Lini 3: RSUD AJIBARANG, RS ANANDA, RS WIRADADI, RS ELISABETH, RS HERMINA, RS DADI KELUARGA, RS SIAGA MEDIKA. KESIAPAN RUANG ISOLASI;
4. Rumah Karantina: DIKLAT BATURRADEN (80 TT);

5. *Ambulance* RS Rujukan dan PCS : 27 Unit.

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk COVID-19 yaitu:

1. Dokter : 529 orang;
2. Perawat : 1.469 orang;
3. Bidan : 282 orang;
4. Tenaga Kesehatan Lainnya : 2.286 orang.

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Deteksi dini dan respon wilayah
 - a. *Screening* menggunakan formulir deteksi dini untuk faskes sesuai pedoman;
 - b. Melakukan Penyelidikan Epidemiologi dan Pelacakan Kontak Erat Positif;
 - c. Pendirian Posko COVID-19 di Seluruh Puskesmas Gratis untuk Mempermudah Akses Informasi Bagi Masyarakat;
 - d. Pendirian Posko Perbatasan di 4 Pintu Masuk Wilayah Banyumas;
 - e. Surat Edaran Bupati bagi seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Institusi berisi upaya pencegahan untuk memutus mata rantai penularan sesuai protokol dari pemerintah;
 - f. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - g. Pencatatan dan Pelaporan Kasus, Mempemudah Akses Informasi bagi masyarakat <http://covid19.banyumaskab.go.id/>
 - h. Menetapkan Fasilitas Karantina Khusus di Baturaden .
2. Perbaikan manajemen klinis
 - a. Penunjukan Rumah Sakit Lini 3 dan melakukan MOU untuk penanganan pasien PDP dan Konfirmasi COVID-19;
 - b. Penambahan Kapasitas Ruangan Isolasi bagi Rumah Sakit Rujukan Lini 1 dan Lini 2;
 - c. Pengadaan APD, Rapid Test dan Logistik lain untuk manajemen klinis kasus COVID-19 dengan menggunakan dana BTT.
3. Komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat
 - a. Pembentukan Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Desa, Tingkat RW dan RT;
 - b. Media Promosi Kesehatan Melalui Siaran TV dan Radio, Poster dan Media Sosial;
 - c. Informasi Terkait COVID-19 disediakan secara cepat, transparan dan mudah diakses;
 - d. Koordinasi Forkompimda dengan Lintas Organisasi Profesi (IDI, PPNI, Ormas, Pemuka Agama, FKUB) dan LSM;
 - e. Pak Bupati sebagai Juru Bicara COVID-19;
 - f. Mengatasi ketidakpastian, persepsi, dan manajemen informasi yang salah/hoaks.

Untuk kegiatan preventif yang dilakukan yaitu Jaring Pengaman Sosial. Jaring Pengaman Sosial yang dilaksanakan yaitu :

1. Untuk Masyarakat Yang Terdampak Langsung Covid-19 yang dilaksanakan yaitu pemberian bantuan Sembako kepada OPD senilai Rp100.000,00 per rumah tangga per-14 (empat belas) hari untuk waktu 2 (dua) bulan.
2. Pelaksanaan pasar murah oleh Dinperdag dengan realisasi 2.000 paket sembako.
3. Supervisi ASN untuk pengawasan Gugus Tugas Desa/Kelurahan & RT.
4. Peran aktif setiap orang dalam Penanggulangan Penyebarluasan Covid-19 di Kabupaten Banyumas, dengan wajib selalu menggunakan masker/tutup mulut dan hidung baik di dalam ruangan/rumah/kantor/Gedung maupun di luar ruangan/rumah/kantor/gedung
5. Menyiapkan Rumah Sakit Geriatri sebagai Pusat Rumah Sakit Covid-19.

Bupati Banyumas,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Adm Umum Sekda Kab. Bms	
3	Kabag Hukum Sekda Kab. Bms	
4	Ka BKAD	

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
 PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

A.						Dalam Rupiah		
No.	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Pendapatan	Biaya	Pajak	Laba	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Bidang Penyediaan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020	LK	-	92.604.879.299,71	48.691.604.389,61	1.963.514.000,00	5.731.645.192,37	
	Sub Total (1)			92.604.879.299,71	48.691.604.389,61	1.963.514.000,00	5.731.645.192,37	
2	Bidang Aneka Industri PT. Banyumas Investama Java (Perseroda) Tahun 2020	LK	-	566.799.505,00	538.415.390,00	5.667.995,00	22.585.539,00	
	Sub Total (2)			566.799.505,00	538.415.390,00	5.667.995,00	22.585.539,00	
3	Bidang Pengelolaan Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria Tahun 2020	LK	-	2.577.022.140,00	2.573.364.479,00	1.529.700,00	63.300.394,00	
	Sub Total (3)			2.577.022.140,00	2.573.364.479,00	1.529.700,00	63.300.394,00	
Total Seluruh Bidang				95.748.700.944,71	51.803.384.258,61	1.970.711.695,00	5.817.531.125,37	

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
 AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

B.

Dalam Rupiah

No.	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Kewajiban Lainnya	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disertor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11	12 = 9+10+11	13	14	15	16	17	18
1	Bidang Penyediaan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sauria Tahun 2020	LK	-	33.526.177.923,61	178.692.376.525,22	-	212.218.554.448,83	9.059.511.056,29	6.259.185.772,07	-	15.318.696.828,36	173.689.391.190,53	-	-	12.856.157.425,40	10.258.913.504,54	196.899.857.620,47
2	Sub Total (1) Bidang Arus Industri PT. Banyumas Investama Jawa (Persero) Tahun 2020	LK	-	918.669.831,00	22.424.435,41	2.694.406.785,00	3.635.501.051,41	547.875.434,00	368.171.166,00	556.365.225,84	1.472.411.825,84	2.010.000.000,00	-	-	130.503.686,27	22.585.539,30	2.163.069.225,57
3	Sub Total (2) Bidang Pengelolaan Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Sauria Tahun 2020	LK	-	1.800.494.719,00	639.862.733,00	-	2.440.377.452,00	47.606.800,00	-	-	47.606.800,00	-	-	-	61.770.694,00	(79.920.042,80)	2.392.770.652,00
	Sub Total (3)			1.800.494.719,00	639.862.733,00	-	2.440.377.452,00	47.606.800,00	-	-	47.606.800,00	0,00	0,00	0,00	61.770.694,00	(79.920.042,80)	2.392.770.652,00
Total Seluruh Bidang				36.245.342.473,61	179.354.683.693,63	2.694.406.785,00	218.294.432.952,24	9.654.993.290,29	6.627.356.938,07	856.365.225,84	16.838.715.454,20	178.699.391.190,53	-	-	13.048.431.805,67	9.541.579.001,84	301.455.717.498,04

BUPATI BANYUMAS ,

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab. Bms	
2	Asmin	
3	Kabag. hukum	
4	Ka. BKAD	



ACHMAD HUSEIN